

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
STRUKTUR BIROKRASI, DAN PEMAHAMAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
EFEKTIVITAS PENYALURAN ALOKASI DANA DESA**

RAHMA YUNIS

8335132562



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

***THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES QUALITY,
BUREAUCRATIC STRUCTURE, AND UNDERSTANDING OF
REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM ON
EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND ALLOCATION
DISTRIBUTION***

RAHMA YUNIS

8335132562



Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment

STUDY PROGRAM OF S1 ACCOUNTING

FACULTY OF ECONOMICS

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

ABSTRAK

RAHMA YUNIS. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Struktur Birokrasi, dan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa. Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi, dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel Kepala Urusan Keuangan (KAUR Keuangan) yang bekerja di kantor desa yang ada di Kabupaten Sumedang. Populasi penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Sumedang dengan jumlah 270 desa. Dalam penelitian ini digunakan teknik *random sampling* dalam pengambilan sampel, dimana terdapat 113 responden sebagai sampel.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda, menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 22. Variabel dependen pada penelitian ini adalah efektivitas penyaluran alokasi dana desa dengan kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi, dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Variabel struktur birokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Dan variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa.

Kata Kunci : Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa, Kualitas Sumber Daya Manusia, Struktur Birokrasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

ABSTRACT

RAHMA YUNIS. The Influence of Human Resources Quality, Bureaucratic Structure, and Understanding of Regional Financial Accounting System on Effectiveness of Village Fund Allocation Distribution. Faculty of Economics, Study Program of S1 Akuntansi, Universitas Negeri Jakarta. 2017.

This research aims to analyze the influence between human resources quality, bureaucratic structure, and understanding of regional financial accounting system on effectiveness of Village Fund Allocation distribution. This research uses primary data with Chief Financial Officer whom work in village office in Sumedang District as a respondent. Population of this research is all villages in Sumedang District with 270 villages. While sampling method use random sampling method and obtained 113 respondent as a sample.

Data analysis was done by using multiple linear regression method, using IBM SPSS version 22 application. Dependent variable of this research is effectiveness of Village Fund Allocation distribution and the influence of human resources quality, bureaucratic structure, and understanding of regional financial accounting system as an independent variable. The result shows that Human resources quality variable have no effect to effectiveness of Village Fund Allocation distribution. Bureaucratic structure variable have significant positive effect to effectiveness of Village Fund Allocation distribution. And understanding of regional financial accounting system variable have significant positive effect to effectiveness of Village Fund Allocation distribution.

Keywords: Effectiveness of Village Fund Allocation Distribution, Human Resources Quality, Bureaucratic Structure, Understanding of Regional Financial Accounting System.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
<u>Dr. Erty Gurendrawati, SE, M.Si, Ak, Phd</u> NIP. 19680314 199203 2 002	Ketua Penguji		25/7 - 2017
<u>Indah Mulia Sari, SE, M.Si</u> NIDK. 8886100016	Sekretaris		27/7 - 2017
<u>Yunika Murdavanti, SE, M.Si, M.Ak</u> NIP. 19780621 200801 2 011	Penguji Ahli		28/7 - 2017
<u>Dr. Rida Prihatni, SE, M.Si, Ak, CA</u> NIP. 19760425 200112 2 002	Pembimbing I		31/7 - 2017
<u>Diana Noviarini, SE, MMSi</u> NIP. 19751115 200812 2 002	Pembimbing II		2/8 - 2017

Tanggal Lulus : 17 Juli 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Rahma Yunis
NIM. 8335132562

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Struktur Birokrasi, dan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa" tepat waktu. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, serta pertolongan-Nya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, bantuan materil dan semangat bagi Penulis;
3. Bapak Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;

4. Ibu Dr. Rida Prihatni, SE,M.Si.,Ak.,CA, dan Ibu Diena Noviarini, SE,MMSi, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, kritik, saran, motivasi, dan semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Nuramalia Hasanah, SE,M.Ak, selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta periode 2013-2017;
6. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE,M.Si.,Ak,CA, selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta periode 2017-2021;
7. Seluruh Dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis duduk dibangku perkuliahan;
8. Sahabat-sahabat terbaik Penulis, Sifa Fauziah, Shelly Anggraeni Putri, Lina Apriliana, Dimas Dwi Hadiansyah, RM Oke Cikal Prayoga, Intan Fitriyanti, Irma Yunita Silitonga, atas segala bentuk dukungan, semangat, kebahagiaan dan kenangan terbaik yang telah diberikan pada Penulis;
9. Rekan-rekan mahasiswa/i S1 Akuntansi 2013 Reguler A dan juga seluruh keluarga Akuntansi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2013. Terima kasih atas kebersamaan selama empat tahun ini, semoga silaturahmi selalu terjaga; dan

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis telah berupaya menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu Penulis harapkan bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah.....	12
D. Perumusan Masalah.....	13
E. Kegunaan Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Deskripsi Konseptual.....	15
1. Teori Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Theory</i>)	15
2. Akuntansi Sektor Publik.....	17
3. Alokasi Dana Desa.....	27

4. Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa	32
5. Kualitas Sumber Daya Manusia	33
6. Struktur Birokrasi.....	34
7. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	38
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	39
C. Kerangka Teoritik	45
D. Perumusan Hipotesis Penelitian.....	50

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	51
B. Tempat dan Waktu Penelitian atau Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	52
C. Metode Penelitian	52
D. Populasi dan Sampling atau Jenis dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data atau Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	54
1. Variabel Dependen.....	54
2. Variabel Independen.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	66
1. Hasil Pemilihan Sampel.....	66
2. Deskripsi Responden.....	68
3. Analisis Statistik Deskriptif.....	71

B. Pengujian Hipotesis	81
1. Uji Kualitas Data.....	81
1.1 Uji Validitas	82
1.2 Uji Reliabilitas	84
2. Uji Asumsi Klasik	85
2.1 Uji Normalitas.....	86
2.2 Uji Multikolinieritas.....	88
2.3 Uji Heterokedastisitas	89
3. Analisis Regresi Linear Berganda	91
4. Uji Hipotesis	93
4.1 Uji Parsial (Uji-t).....	93
4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F).....	95
4.3 Koefisiensi Determinasi (R^2).....	97
C. Pembahasan	98
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	
A. Kesimpulan	108
B. Implikasi.....	109
C. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN	119
RIWAYAT HIDUP	144

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penelitian Skripsi.....	119
Lampiran 2	Surat Pemberian Izin Penelitian	120
Lampiran 3	Kuesioner Penelitian Sebelum Uji Kualitas Data.....	121
Lampiran 4	Kuesioner Penelitian Setelah Uji Kualitas Data.....	125
Lampiran 5	Hasil Uji Reliabilitas	129
Lampiran 6	Hasil Uji Validitas	130
Lampiran 7	Data Jawaban Kuesioner Responden.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Tabel Literatur dari Penelitian Relevan.....	40
Tabel III.1	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	59
Tabel IV.1	Tingkat Penyebaran dan Pengambilan Kuesioner.....	67
Tabel IV.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
Tabel IV.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	69
Tabel IV.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	70
Tabel IV.5	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	72
Tabel IV.6	Distribusi Frekuensi Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa	73
Tabel IV.7	Distribusi Frekuensi Kualitas Sumber Daya Manusia	75
Tabel IV.8	Distribusi Frekuensi Struktur Birokrasi.....	77
Tabel IV.9	Distribusi Frekuensi Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	80
Tabel IV.10	Perbandingan r-hitung dan r-tabel.....	83
Tabel IV.11	Hasil Uji Reliabilitas	85
Tabel IV.12	Hasil <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnof</i>	87
Tabel IV.13	Hasil Uji Multikolinearitas.....	88
Tabel IV.14	Hasil Uji <i>Glejser</i>	90
Tabel IV.15	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	91
Tabel IV.16	Hasil Uji-t	94
Tabel IV.17	Hasil Uji-F	96
Tabel IV.18	Hasil Koefisiensi Determinasi (R^2).....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa	22
Gambar II.2	Kerangka Teoritik.....	49
Gambar IV.1	Grafik Histogram Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa	74
Gambar IV.2	Grafik Histogram Kualitas Sumber Daya Manusia.....	76
Gambar IV.3	Grafik Histogram Struktur Birokrasi.....	79
Gambar IV.4	Grafik Histogram Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	81
Gambar IV.5	Grafik P-Plot Uji Normalitas.....	86
Gambar IV.6	Grafik <i>Scatterplot</i>	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menimbulkan berbagai permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat terkait sistem ketatanegaraan dan tuntutan dari daerah-daerah atas kesenjangan sosial yang dialaminya. Berbagai tuntutan tersebut mengakibatkan masa pemerintahan orde baru runtuh pada tahun 1998. Wacana diberlakukannya otonomi daerah kemudian bergulir sebagai jawaban atas masalah ketatanegaraan dan tuntutan dari berbagai daerah.

Konsep otonomi daerah dewasa ini, diikuti dengan adanya perubahan-perubahan, baik peraturan perundang-undangan maupun sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kita pada masa lalu lebih bersifat sentralistik, tetapi sekarang daerah harus mampu mengembangkan rumah tangganya sendiri. Bertambahnya kewenangan yang diserahkan kepada daerah saat ini, maka secara otomatis merubah sistem pemerintahan, kebijakan dan program serta cara pandang dan sikap para pelaksana pemerintahan di daerah. Perpindahan sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi berarti adanya suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sejalan dengan itu maka

daerah dengan sendirinya menentukan semua kewenangan pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari hasil yang diperoleh daerahnya sendiri (Putra, 2014).

Sistem sentralisasi yang digunakan menyebabkan aparatur pemerintah pusat kurang dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik, sehingga banyak merugikan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, sistem pemerintahan yang dahulu bersifat sentralistis ternyata banyak membuat kesenjangan pembangunan dan terlalu terpusatnya kekayaan Negara di pemerintahan pusat sehingga mengalami masalah yang sangat pelik. Seiring dengan itu maka otonomi daerah menjadi jawaban yang paling tepat saat ini pada masa perubahan kepemimpinan dan sistem di Indonesia (Putra, 2014).

Satu tahun setelah terdengarnya wacana tersebut, lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga sebagai awal mula lahirnya otonomi daerah di Indonesia. Dalam butir pertama dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah”. Yang kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 dianggap telah memenuhi kebutuhan demokrasi dan pembangunan daerah di Indonesia. Namun seiring dengan berkembangnya zaman ternyata kedua UU tersebut memiliki kelemahan dan

mengalami revisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Berlakunya UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mulai tahun 2005 karena terjadi perubahan mendasar yang menjadikan pemerintahan daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab tidak hanya dibidang ekonomi tetapi juga politik. Dengan demikian, perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan layanan publik tingkat lokal, serta sesuai dengan asas demokrasi (Manalu, 2014, www.kompasiana.com)

Dengan diberikannya kewenangan kepada aparatur pemerintahan daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia secara merata dan menyeluruh. Bukan hanya mengelola dari segi politik, tetapi juga dari segi sosial dan ekonomi. Sehingga setiap daerah di Indonesia dapat mengembangkan dan memajukan potensi yang ada di daerahnya masing-masing dengan dana yang dihasilkan dari daerah itu sendiri, dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan sumber dana lainnya.

Otonomi daerah tidak hanya dirasakan sampai ditingkat provinsi ataupun kabupaten, tetapi juga pada tingkat pemerintahan terendah yaitu desa. Setiap desa memiliki hak yang sama untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan mengembangkan potensi daerahnya demi kesejahteraan masyarakat. UU No.32/2004 dan UU No.33/2004 rupanya belum mampu memenuhi setiap

kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Peraturan tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman terutama menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat desa. Sehingga lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan agar setiap masalah yang timbul di desa dapat teratasi dan tercipta keadaan yang aman dan harmonis di setiap penjuru Indonesia. UU No.6/2014 mengatur mulai dari wilayah, aparatur pemerintahan desa sampai dengan keuangan desa.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada UU No.33/2004. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendanaan yang urusannya diserahkan kepada pemerintahan desa. Tiap-tiap desa memiliki besaran yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi dari masing-masing desa. Dikutip dari artikel yang ditulis oleh Adang Jukardi (www.pikiran-rakyat.com, 2015), Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumedang tahun 2016 mengalami kenaikan. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumedang yang awalnya hanya 3 persen dari dana perimbangan

setelah dikurang Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2015, naik menjadi 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK. Dengan kenaikan tersebut, secara otomatis akan menambah penghasilan tetap (siltap) kepala desa. Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai mekanisme dalam PP Nomor 60 Tahun 2014, akan menerima dana desa yang selanjutnya akan diteruskan ke desa. Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam APBD setiap tahun anggaran. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke desa dilakukan secara bertahap, dan diatur dalam peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, www.bpkp.go.id).

Jurniadi, et al. (2015) meneliti mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Faktor-faktor yang diteliti meliputi partisipatif, transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dapat diketahui variabel partisipatif (X1), transparansi (X2), akuntabel (X3), dan berkelanjutan (X4) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.

Maraknya kasus korupsi yang menimpa aparatur pemerintahan mencerminkan betapa buruknya pengawasan dan sistem pengendalian internal didalam tubuh lembaga pemerintahan. Dari data yang dilansir oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), pada periode 2010-2015 tercatat 133 kasus korupsi terjadi di desa; 186 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian yang

dialami negara diperkirakan sebesar 205 miliar rupiah. Menurut Tama S Langkun, peneliti ICW, dari jumlah tersangka itu, kepala desa paling banyak, mencapai 122 kepala desa disusul 26 orang aparat desa dan sejumlah tersangka lainnya, dengan 16 kasus korupsi terjadi di Jawa Barat. Hasil analisis menyatakan bahwa bentuk terbanyak dalam kasus korupsi di desa tersebut merupakan kasus penggelapan dana (MR, 2016, www.hukumonline.com).

Sumber daya manusia yang berkualitas baik sebagai aparatur desa dapat membantu untuk memajukan desa yang dikelolanya. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pencapaian pembangunan bangsa dan negara, karena menjadi objek dan subjek pelaksanaan pembangunan itu sendiri (Radar Tarakan, www.humas-malinau.go.id, 2016). Sudah menjadi fenomena umum di negeri ini, bahwa hampir seluruh unsur pimpinan pemerintahan senantiasa meletakkan pengembangan sumber daya manusia pada urutan teratas dari program kerjanya. Namun, didalam implementasinya, pengembangan sumber daya manusia ini tidak berjalan sebagaimana mestinya atau hanya slogan saja (Tuasikal, www.tribun-maluku.com, 2014). Padahal, sumber daya manusia sebagai aparatur desa yang berkualitas dapat membantu desa melaksanakan kebijakan di desanya secara lebih efektif.

Rahayu et al. (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pada dasarnya kinerja instansi adalah tingkat pencapaian hasil dari suatu kegiatan dalam sebuah instansi pemerintah berkaitan dengan penggunaan dana secara efisien dan efektif baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya (Arsyati et al., 2008 dalam Rahayu et al., 2014). Kinerja organisasi sektor publik dapat dilihat dari penggunaan anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga dalam penelitian ini digunakan variabel kualitas sumber daya manusia untuk melihat efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa.

Birokrasi di Indonesia menghadapi banyak masalah. Keluhan atas birokrasi sudah jamak kita dengar. Bukan hanya publik yang mengeluh dengan kualitas birokrasi pemerintah. Birokrasi memiliki masalah sendiri dengan birokrat. Salah satunya, seorang birokrat muda mengeluhkan lamanya birokrasi beradaptasi dengan teknologi. Mereka harus berkomunikasi dengan berbasis kertas di lingkungan kerjanya, bukan surat elektronik atau medium berbasis internet lainnya. Hasilnya, proses surat menyurat jadi lama. Urusan pendelegasian tugas tidak akan selesai dalam waktu sehari. Repotnya, jika bertemu masalah mendesak. Mereka tidak bisa berkelit agar bisa mengimbangi masalah yang makin cepat. Banyak birokrat lebih mementingkan urusan administrasi dibanding urusan pelayanan kepada publik (Rochmi, www.beritagar.id, 2016). Struktur birokrasi pemerintahan yang masih berbelit-belit membuat keterlambatan dan kecurangan terjadi pada jalannya kegiatan pemerintah. Keterlambatan ini akan menurunkan tingkat efektivitas pemerintah dalam menjalankan kebijakannya dan membuat pembangunan daerah menjadi tertunda.

Prasetyo (2015) melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di 10 desa wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Adapun faktor-faktor yang diteliti meliputi komunikasi, kemampuan sumberdaya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah berjalan dengan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang masih belum optimal. Diantara faktor-faktor tersebut, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor kemampuan sumberdaya serta faktor ukuran dan tujuan kebijakan yang sangat kuat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintahan harus sudah berbasis akrual. Akan tetapi karena pemahaman yang belum cukup, akhirnya pemerintahan Indonesia menggabungkan basis kas dan basis akrual yaitu menjadi sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual. Basis ini pada dasarnya adalah basis kas dengan penerapan akrual pada akhir periode pelaporan. Dengan basis kas menuju akrual, pendapatan diakui pada saat kas diterima ke Kas Negara dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Negara. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah

Pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dicatat menggunakan basis akrual. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya, terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang diberlakukan mulai tahun 2015 ini belum berjalan optimal. Menteri Dalam Negeri, Tjahjoe Kumolo mengatakan, ada beberapa kendala yang dihadapi daerah dalam menerapkan sistem akuntansi yang baru tersebut. Kendala yang dihadapi diantaranya kuantitas sumber daya manusia pengelola keuangan, kompetensi, dan komitmen kepala daerah dalam mendorong optimalisasi penerapan laporan keuangan berbasis akrual di daerah (Berita Kemendagri, www.kemendagri.go.id, 2015). Dari situ dapat dilihat bahwa pemahaman aparatur pemerintahan daerah akan sistem akuntansi keuangan daerah sangatlah penting. Karena mereka lah yang bertugas sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan daerah. Apabila aparatur pemerintahan daerahnya paham akan sistem yang digunakan, pelaksanaannya akan dilakukan tepat waktu dan dapat meningkatkan efektivitas.

Sugeng (2014) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya terhadap kinerja

pemerintah daerah di Kabupaten Kediri. Faktor-faktor yang diteliti meliputi kompetensi aparatur, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, pengawasan internal, dan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel interverning. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten Kediri di dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, pengembangan sistem yang menunjang memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang lebih hati-hati, guna menghindari penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Hasil penelitian untuk variabel kompetensi aparatur dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, sedangkan variabel pengawasan internal secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Untuk variabel interverning yaitu pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Menurut Paton dalam Tandiontong (2016), mengemukakan bahwa teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) adalah organisasi dipandang merupakan suatu unit ekonomi terpisah yang beroperasi terutama untuk kepentingan pemegang saham. Pemegang saham yang dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan merupakan orang yang bertanggungjawab membuat kebijakan di daerahnya. Sumber daya manusia yang kompeten yang bertanggungjawab menjadi aparatur pemerintahan akan menghasilkan kebijakan yang baik yang dapat memajukan daerahnya. Salah satu contoh kebijakan itu seperti peraturan yang mengatur tentang penyaluran Alokasi Dana Desa. Pembuat kebijakan akan mencari sumber daya manusia yang kompeten yang ditunjuk

sebagai aparatur desa untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuatnya. Selain sumber daya manusia, struktur birokrasi yang mudah dilaksanakan dan pemahaman aparatur pemerintahan akan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik akan membantu terciptanya penyaluran Alokasi Dana Desa yang efektif.

Menurut penuturan Ibu Ine Inayah selaku Kepala Bagian Keuangan pada Perbendaharaan Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, hasil audit laporan keuangan Kabupaten Sumedang tahun 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya, laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sudah baik dan tidak ditemukan kesalahan yang material atau potensi kecurangan. Opini tersebut merupakan hasil audit laporan keuangan daerah lingkup Kabupaten. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat dari sudut pandang pemerintahan terkecil yaitu desa, dengan melihat efektivitas dari penyaluran Alokasi Dana Desa. Berdasarkan kondisi yang sudah diuraikan diatas, peneliti hendak melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Struktur Birokrasi, dan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumedang.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka berikut ini akan diuraikan masalah dari penelitian ini yang mempengaruhi efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa:

1. Maraknya kasus korupsi yang menimpa aparat desa.

2. Pengembangan sumber daya manusia tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Alur birokrasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam penyelesaiannya.
4. Lamanya birokrasi beradaptasi dengan teknologi.
5. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual belum optimal.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa diukur dengan indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan tercapainya tujuan.
2. Kualitas sumber daya manusia diukur dengan indikator keterampilan, latar belakang pendidikan, mengikuti pendidikan atau pelatihan, dan pengalaman.
3. Struktur birokrasi diukur dengan indikator hirarki, tugas-tugas, wewenang, dan tanggungjawab.
4. Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah diukur dengan indikator prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, aset, dan penyajian laporan keuangan.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumedang?
2. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumedang?
3. Apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumedang?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca baik dari segi edukasi maupun praktik. Berikut manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan adanya pengaruh antara kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Sehingga dapat mendukung teori pemangku kepentingan dimana para pemangku kepentingan sebagai orang yang membuat kebijakan-kebijakan yang baik dan dapat berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa.

2. Kegunaan Praktis:

a. Pemerintah Kabupaten Sumedang

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Sumedang menemukan kendala atas kebijakan yang telah dibuat berkaitan dengan aparatur desa, birokrasi pencairan dana, dan sistem akuntansi yang digunakan yang dapat menghambat tingkat efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Pemangku kepentingan adalah terjemahan dari kata *stakeholder* yang diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dari permasalahan yang sedang diangkat. Freeman (1984) dalam Tandiontong (2016) mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.

Berdasarkan kekuatan posisi penting dan pengaruh *stakeholder* terhadap suatu isu, *stakeholder* dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. ODA (1995) dalam Tandiontong (2016) mengelompokkan *stakeholder* seperti berikut:

- a. *Stakeholder* utama (primer): merupakan *stakeholder* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.

- b. *Stakeholder* pendukung (sekunder): adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian(*concern*) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.
- c. *Stakeholder* kunci: merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi.

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dari Paton (Tandiontong, 2016) mengemukakan bahwa organisasi dipandang merupakan suatu unit ekonomi terpisah yang beroperasi terutama untuk kepentingan pemegang saham. Untuk itu perlu dilakukan analisis pemangku kepentingan sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi individu, kelompok dan organisasi yang dipengaruhi atau dapat memengaruhi lingkungan dan generasi yang akan datang serta memprioritaskan individu-individu dan kelompok untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Reed et al., 2009 dalam Nurfatriani et al., 2015). Hal ini disebabkan karena pembuatan kebijakan lebih merupakan suatu proses sosial yang dilakukan oleh para aktor dan diantara para aktor, daripada sebuah upaya yang rasional untuk mencari solusi optimal dalam menyelesaikan suatu masalah (Hermans & Thissen, 2009 dalam Nurfatriani et al., 2015).

Pembuat kebijakan atas penyaluran Alokasi Dana Desa merupakan pemerintah Kabupaten Sumedang. Pembuat kebijakan akan menunjuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan dan mengelola atas Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah aparatur desa. Aparatur desa akan mengikuti struktur birokrasi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa. Setelah dana disalurkan ke kas desa, pelaksanaan kegiatan atas penggunaan dana harus dicatatkan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Sehingga aparatur desa harus memiliki pemahaman akan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik, agar dalam pelaksanaan pengelolaan maupun permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tidak mengalami keterlambatan dan kendala yang berarti. Sehingga penyaluran atas Alokasi Dana Desa dapat berjalan dengan baik dan efektif.

2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Akuntansi terbagi atas tiga bagian utama, yaitu akuntansi komersial, akuntansi sektor publik, dan akuntansi sosial (Nordiawan, et al., 2009).

Akuntansi sektor publik memberikan informasi keuangan dari entitas-entitas yang tidak mencari laba. Akuntansi sektor publik terbagi dua, yaitu akuntansi pemerintahan dan akuntansi non profit lainnya. Akuntansi

pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Disamping itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku (Nordiawan, et al., 2009).

2.1 Anggaran Pemerintah

Menurut Freeman (2003) dalam Nordiawan et al. (2009), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik adalah (Nordiawan et al., 2009):

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan;
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian;
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan;
- d. Anggaran sebagai alat politik;
- e. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja; dan
- f. Anggaran sebagai alat motivasi.

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Setiap tahun pemerintah menghimpun dan membelanjakan dana triliunan rupiah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, APBN harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Dalam hal ini, presiden berkewajiban menyusun dan mengajukan Rancangan APBN (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RAPBN tersebut memuat asumsi umum yang mendasari penyusunan APBN, perkiraan penerimaan, pengeluaran, transfer, defisit/surplus, dan pembiayaan defisit, serta kebijaksanaan pemerintah. Selain itu juga dimuat perkiraan terperinci mengenai pengeluaran dan penerimaan departemen/lembaga, proyek, data aktual, proyeksi perekonomian, dan informasi terkait lainnya. Semuanya dituangkan dalam Nota Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rancangan Undang-Undang APBN yang disampaikan kepada DPR (Nordiawan et al., 2009).

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Secara garis besar,

struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. APBDes memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, koordinasi dan komunikasi, penilaian kinerja, dan motivasi. Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa (Sujarweni, 2015).

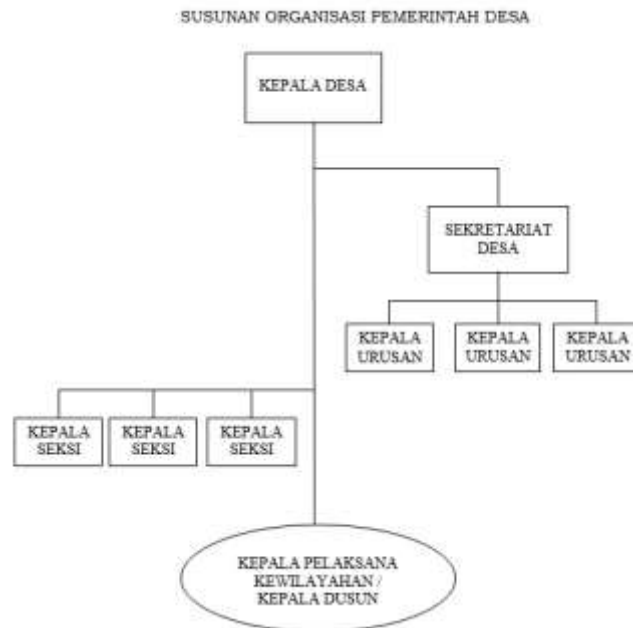
2.1.3.1 Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

2.1.3.1.1 Struktur Organisasi Desa

Pemerintahan Desa menurut Permendagri 113/2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal (Sujarweni, 2015). Berikut adalah struktur organisasi pemerintah desa menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa:



Gambar II.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

a. Kepala Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (UU 6/2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (UU 6/2014 Pasal 26 Ayat 1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban (UU 6/2014 Pasal 26 Ayat 4):

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- 3) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- 5) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- 10) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 12) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 13) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 14) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- 15) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

b. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah (Sujarweni, 2015):

- 1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- 2) Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
- 3) Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 4) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

c. Kepala Urusan (Sujarweni, 2015)

- 1) Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM), memiliki tugas membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
- 2) Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN), memiliki tugas membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengeolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
- 3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA), memiliki tugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

4) Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU), memiliki tugas membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDes, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

5) Mengelola administrasi keuangan desa;

- a) Mempersiapkan bahan penyusunan APBDes;
- b) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

6) Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM), memiliki tugas membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

d. Kepala Seksi (Permendagri 84/2015 Pasal 9)

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas

sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

e. Pelaksana Kewilayahan, Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2.1.3.1.2 Keuangan Desa

Menurut UU 6/2014 Pasal 71, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Permendagri 113/2014 dalam Sujarweni (2015), pendapatan desa dapat berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Transfer, yang terdiri atas:
 - 1) Dana desa;
 - 2) Bagi Hasil Pajak Daerah/Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - 3) Alokasi Dana Desa; dan

- 4) Bantuan Keuangan APBD Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota.
- c. Kelompok pendapatan lain-lain, jenis:
 - 1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - 2) lain-lain pendapatan desa yang sah.

3. Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri 113/2014 Pasal 1 Ayat 10, Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Alokasi Dana Desa direncanakan dan dilaksanakan dengan berpedoman kepada RPJM Desa dan RKP Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) untuk penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat desa (Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang tata cara penyaluran, penggunaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan Alokasi Dana Desa Pasal 8). Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 yaitu (Perbup Sumedang 5/2016 Pasal 9):

- a. Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain:
 - 1) Penetapan dan penegasan batas desa;
 - 2) Pendataan desa;

- 3) Penyusunan tata ruang desa;
 - 4) Penyelenggaraan musyawarah desa;
 - 5) Pengelolaan informasi desa;
 - 6) Penyelenggaraan perencanaan desa;
 - 7) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
 - 8) Penyelenggaraan kerjasama antar desa;
 - 9) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan
 - 10) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- b. Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa antara lain:
- 1) Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, meliputi:
 - a) Jalan pemukiman;
 - b) Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 - c) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - d) Lingkungan pemukiman masyarakat desa; dan
 - e) Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
 - 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, meliputi:
 - a) Air bersih berskala desa;
 - b) Sanitasi lingkungan;
 - c) Pelayanan kesehatan desa, seperti posyandu; dan

- d) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 - a) Taman bacaan masyarakat;
 - b) Pendidikan anak usia dini;
 - c) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
 - 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - a) Pasar desa;
 - b) Pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
 - c) Penguatan permodalan BUMDesa;
 - d) Pembibitan tanaman pangan;
 - e) Penggilingan padi;
 - f) Lumbung desa;
 - g) Pembukaan lahan pertanian;
 - h) Pengelolaan usaha hutan desa;
 - i) Kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j) Kandang ternak;

- k) Instalasi biogas;
 - l) Mesin pakan ternak; dan
 - m) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
- a) Penghijauan;
 - b) Pembuatan terasering;
 - c) Perlindungan mata air;
 - d) Pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - e) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- c. Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
- 1) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
 - 2) Pelatihan teknologi tepat guna;
 - 3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD; dan
 - 4) Peningkatan kapasitas masyarakat meliputi:
 - a) Kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - b) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) Kelompok perempuan;
 - d) Kelompok tani;
 - e) Kelompok masyarakat miskin;
 - f) Kelompok pengrajin;
 - g) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

- h) Kelompok pemuda; dan
 - i) Kelompok lain sesuai kondisi desa.
- d. Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan, antara lain:
- 1) Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - 2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - 3) Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - 4) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - 5) Pembinaan lembaga adat;
 - 6) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - 7) Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menggunakan perhitungan sebagai berikut (Perbup Sumedang 5/2016 Pasal 10):

- a. Alokasi Dana Desa yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
- b. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);

- c. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Penggunaan batas minimal sampai dengan maksimal ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

4. Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

Amin Tunggul Widjaya (1993) mengemukakan, efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan (www.landasanteori.com, 2015). Menurut Effendy (2003) dalam Moningka (2014) efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Mardiasmo (2002) dalam Panggulu (2013) mengatakan efektivitas berarti bahwa penggunaan

anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik, kata anggaran disini merupakan sumber dari dana masyarakat (*public money*) yang dimana diharapkan menghasilkan output yang maksimal atau berdaya guna. Efektivitas merupakan hasil yang dicapai pekerja dibandingkan jumlah hasil produksi lain dengan jangka waktu tertentu. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan (Sipayung, 2014). Sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa adalah tercapainya tujuan pemerintah daerah untuk menyalurkan sejumlah Alokasi Dana Desa dengan tepat sasaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dengan waktu penyaluran sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2003) dalam Tewu (2015) sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. Sumber daya manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif sumber daya manusia, tidak berarti apa-apa.

Dalam lingkup pemerintahan desa, sumber daya manusia terdiri atas kepala desa dan perangkat desa yang merupakan pelaku kebijakan daerah. Menurut Winarno (2002) dalam Prasetyo (2015) menyebutkan bahwa sumber daya manusia atau sumber daya organisasi adalah sumber-sumber yang akan

mendukung kebijakan program Alokasi Dana Desa yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai keterampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas. Sumber daya manusia yang berkompetensi baik akan membantu kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga akan membantu kelancaran penerimaan dana bagi desa, memanfaatkan dan mengelola dana dengan baik, juga mengurangi tingkat kecurangan didalam tubuh pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Wansyah, et al., 2012 dalam Riawan, 2016). Kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual atau kejujuran (Danim, 1996 dalam Pamungkas, 2015)

6. Struktur Birokrasi

Menurut Siagian (1995) dalam Yusrialis (2012) organisasi (birokrasi) adalah kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu budaya birokrasi akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi; menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi; menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi; menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh para anggota organisasi; menentukan cara-cara kerja yang

tepat, dan sebagainya. Dalam pengertian netral birokrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara dibawah pejabat politik, atau keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif, atau birokrasi bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar (*every big organization is bureaucracy*) (Santoso, 1993 dalam Yusrialis, 2012).

Struktur birokrasi, yaitu kerangka yang merupakan visualisasi dari tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab, serta batas-batas formal jabatan (Ariyani, et al., 2014). Dalam Alokasi Dana Desa, struktur birokrasi diartikan sebagai alur dalam pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa. Perbup Sumedang 5/2016 Pasal 2 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan Alokasi Dana Desa disalurkan kepada desa dalam 4 (empat) tahap pada anggaran berjalan yaitu:

- a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Penyaluran Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Surat Penyediaan Dana pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Perbup Sumedang 5/2016 Pasal 3). Berikut adalah alur dalam penyaluran Alokasi Dana Desa menurut Perbup Sumedang 5/2016 Pasal 4:

a. Permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa dilampiri dengan:

- 1) Surat Pengantar dari Camat;
- 2) Peraturan Desa mengenai APBDesa;
- 3) Kuitansi Penerimaan Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- 4) Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDesa;
- 5) Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi dari Tim Pembina Kecamatan, tahun sebelumnya;
- 6) Lembar Hasil Penelitian kelengkapan administrasi dari Kecamatan;
- 7) Foto copy Buku Rekening Kas Desa;
- 8) Foto copy NPWP Bendahara Desa;
- 9) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10) Realisasi Perkembangan Fisik/Non Fisik dan Keuangan (RPFK) Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- 11) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- b. Permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II, Tahap III dan Tahap IV disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa dilampiri dengan:
- 1) Surat Pengantar dari Camat;
 - 2) Kuitansi Penerimaan Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 3) Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan Alokasi Dana Desa dari Kepala Desa;
 - 4) Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi dari Tim Pembina Kecamatan;
 - 5) Lembar Hasil Penelitian kelengkapan administrasi dari Kecamatan;
 - 6) Realisasi Perkembangan Fisik/Non Fisik dan Keuangan (RPFK) Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa tahun anggaran berjalan; dan

- 7) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran berjalan.

7. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah 24/2005 Pasal 1 ayat 2, menjelaskan bahwa Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemda di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP (Nordawan, et al., 2009). Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah 24/2005 Pasal 1 ayat 3). Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah 24/2005 Pasal 1 ayat 5).

Baik buruknya laporan keuangan salah satunya dapat dilihat melalui sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan

pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Kurnia, 2013).

Pemahaman dapat diartikan sebagai usaha untuk menafsirkan dan mengungkapkan makna sesuatu pada simbol-simbol, simbol-simbol ini dapat dikatakan berasal dari pemaknaan manusia atau sesuatu, sehingga memaknai simbol berarti usaha untuk menyingkap dan menangkap sesuatu yang terkandung dalam simbol itu (Raharjo, 2008 dalam Halen dan Diana, 2013). Halim (2012) dalam Usman dan Lukman (2014) menjelaskan sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, akuntansi aset, dan penyajian laporan keuangan. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pemahaman serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang akan dilakukan ini tidak jauh dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian mengenai Alokasi Dana Desa ini sudah cukup banyak diteliti oleh peneliti di dalam negeri. Walaupun penelitian mengenai efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa dengan pendekatan kuantitatif dan

sumber data sekunder masih cukup sulit ditemukan. Berikut tabel literatur dari penelitian yang relevan:

Tabel II.1

Tabel Literatur dari Penelitian Relevan

No.	Judul, Penulis, Jenis Jurnal	Variabel Penelitian	Hipotesis	Hasil Penelitian
1	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di 10 Desa Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Yudhi Prasetyo Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank. Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat.	Variabel Independen: X1: Komunikasi X2: Sumberdaya X3: Sikap X4: Struktur Birokrasi X5: Lingkungan X6: Ukuran dan Tujuan Kebijakan Variabel Dependen: Y: Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	H1: Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa H2: Sumberdaya mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa H3: Sikap mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa H4: Struktur Birokrasi mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa H5: Lingkungan mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa H6: Ukuran dan Tujuan Kebijakan	Beberapafactoryang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana DesadiKecamatanRembangKabupaten Rembangadalah komunikasi dengan nilai sebesar 1,01 (sedang),kemampuan sumberdaya dengan nilai sebesar 1,02 (sangat kuat),sikap pelaksana dengan nilai sebesar 0,67 (kuat),strukturbirokrasi dengan nilai sebesar 1,35 (kuat), lingkungan dengan nilai 1,01 (lemah)sertaukuran dan tujuan kebijakan.

	ISBN: 978-979-3649-81-8		mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa	
2	<p>Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.</p> <p>Jurniadi, et al.</p> <p>eJournal Administrative Reform, 2015, 1 (1): 112-124. ISSN 2338-7637</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1: Partisipatif</p> <p>X2: Transparansi</p> <p>X3: Akuntabel</p> <p>X4: Berkelanjutan</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y: Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa</p>	<p>H1 = Ada pengaruh antara variabel partisipatif dengan variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.</p> <p>H2 = Ada pengaruh antara variabel transparansi dengan variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.</p> <p>H3: Ada pengaruh antara variabel akuntabel dengan variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.</p> <p>H4: Ada pengaruh variabel berkelanjutan dengan terhadap variabel</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa secara simultan variabel partisipatif (X1), transparansi (X2), akuntabel (X3), dan berkelanjutan (X4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.</p>

			<p>efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.</p> <p>H5: Ada pengaruh secara bersama variabel partisipatif, transparansi, akuntabel dan berkelanjutan dengan variabel penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.</p> <p>H6: Ada variabel yang berpengaruh dominan terhadap variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.</p>	
3	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1: Kompetensi aparatur</p> <p>X2: Pemahaman sistem akuntansi</p>	<p>H1: Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap adap pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>H2: Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah</p>	<p>Hasil penelitian untuk variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian</p>

	<p>Kabupaten Kediri</p> <p>Sugeng</p> <p>Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vol.1 No.2 Juli 2014</p>	<p>X3: Pengawasan Internal</p> <p>Variabel Intervening:</p> <p>Z: Pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y: Kinerja Pemerintah Daerah</p>	<p>berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah</p> <p>H3 : Pengawasan Internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah</p> <p>H4 : Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah</p>	<p>untuk variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan bahwa pemahaman sistem keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>Hasil penelitian untuk variabel pengawasan internal menunjukkan bahwa pengawasan internal secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>Hasil model penelitian 2, untuk variabel pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.</p>
4	<p>Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014.</p> <p>I Wayan Saputra</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa.</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Efektivitas pengelolaan alokasi dana</p>	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli sudah efektif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean yaitu tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012</p>

	Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Vol. 6 No.1 Tahun 2016	desa.		(98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi , dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.
5	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Rahayu, Ni Luh Sri, et al. e-Journal S1 Ak	Variabel Independen: X1: Partisipasi Penyusunan Anggaran X2: Kualitas Sumber Daya Manusia X3: Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Variabel Dependen: Y: Kinerja Pemerintah Daerah	H1: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah H2: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah H3: Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja	Hasil penelitian ini menunjukkan baik secara parsial maupun simultan, variabel partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

	Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Volume 2 No 1 Tahun 2014.		pemerintah daerah	
--	--	--	-------------------	--

C. Kerangka Teoritik

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia (X_1), struktur birokrasi (X_2), dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (X_3) terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (Y).

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

Menurut Winarno (2002) dalam Prasetyo (2015) menyebutkan bahwa sumber daya manusia atau sumber daya organisasi adalah sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan program Alokasi Dana Desa yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai keterampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas. Covey, Roger, dan Rebecca Merrill (1994) dalam Sedarmayanti (2004) dalam Kurnia (2013) menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas hendaknya memiliki kompetensi teknis dimana sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mencapai hasil yang telah disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan, dan mencari alternatif baru. Sumber

daya manusia yang kemudian disebut aparatur desa merupakan pejabat desa yang melaksanakan kebijakan pemerintah daerah untuk mengelola suatu desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Jurniadi, et al. (2015) dan Saputra (2016) menunjukkan bahwa untuk mencapai penyaluran Alokasi Dana Desa yang efektif, diperlukan pelaksanaan akuntabilitas oleh aparatur desa. Pada penelitian Saputra (2016) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Hambatan terjadi pada pelaksana kebijakan. Sedangkan dalam Juniardi, et al., akuntabilitas merupakan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparatur desa yang juga pelaksana kebijakan. Kedua penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2015) yang mengungkapkan bahwa sumber daya manusia sangat kuat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Dalam hal ini kebijakan yang dimaksud berupa Alokasi Dana Desa. Sebelum Alokasi Dana Desa disalurkan ke kas desa, aparatur desa harus melengkapi dokumen-dokumen yang diminta pemerintah daerah. Setiap awal triwulan tahun anggaran, aparatur desa diharuskan menyerahkan dokumennya pada pemerintah daerah. Untuk melengkapi dokumen-dokumen tersebut, diperlukan aparatur desa yang kompeten untuk menyajikan semua dokumennya dengan baik dan benar. Semakin cepat dokumen dilengkapi dan diserahkan pada pemerintah daerah, semakin cepat pula dana akan disalurkan ke kas desa. Dengan demikian, jalannya pembangunan di desa juga akan

semakin efektif apabila penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dilakukan diawal triwulan.

2. Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

Birokrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara dibawah pejabat politik, atau keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif, atau birokrasi bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar (*every big organization is bureaucracy*) (Santoso, 1993 dalam Yusrialis, 2012). Sedangkan struktur organisasi/birokrasi adalah sebagai tata pola yang menghubungkan antara bagian-bagian kerja berdasarkan kedudukan dan jenis kewenangan pejabat, bidang-bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, rentang kendali dan sistem manajemen dalam organisasi yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku (Prasetyo, 2015). Struktur birokrasi dalam Alokasi Dana Desa mengatur tentang tahapan dan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh aparatur desa dalam melakukan pencairan dana. Struktur birokrasi yang terlalu rumit dapat menghambat aparatur desa dalam memenuhi syarat-syarat pencairan dananya. Sehingga seringkali pemenuhan syarat pencairan dana dilakukan pada akhir triwulan yang membuat penyaluran dana juga menjadi terlambat. Keterlambatan ini akan mengganggu jalannya pembangunan desa, dikarenakan dana yang dibutuhkan belum dapat diterima oleh kas desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2015) mengungkapkan bahwa struktur birokrasi kuat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Alokasi

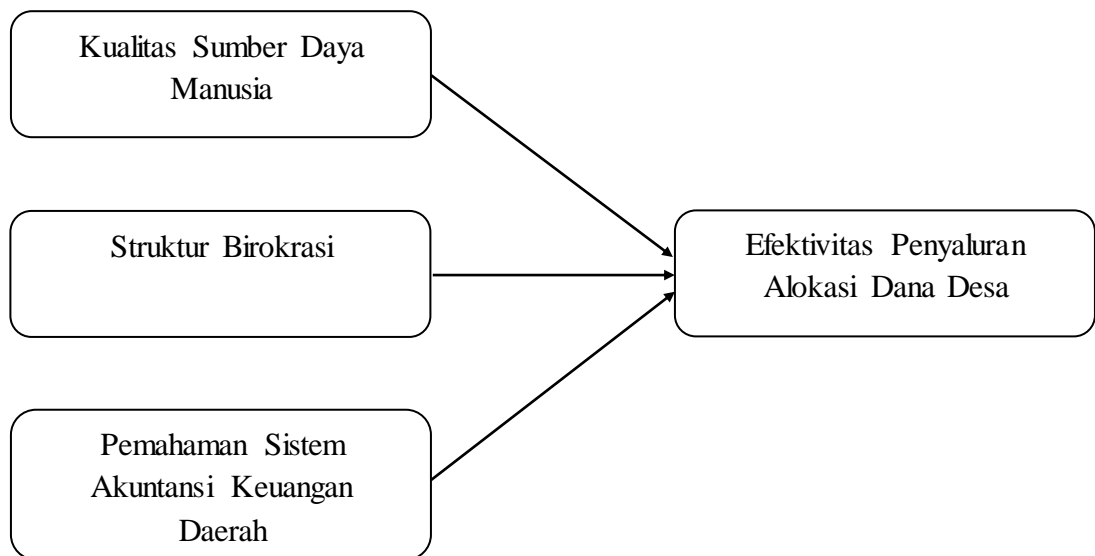
Dana Desa. Lokasi penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang terdiri dari 34 Desa/Kelurahan. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa yaitu merupakan suatu upaya untuk menyalurkan Alokasi Dana Desa pada kurun waktu yang telah ditetapkan dengan penyaluran yang diharapkan berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat membuat struktur birokrasi yang lebih mudah dijalankan namun tidak menghilangkan akuntabilitas dan kualitas dari dokumen syarat pencairan dana, sehingga penyaluran Alokasi Dana Desa dapat berjalan dengan efektif.

3. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Kurnia, 2013). Aparatur desa sebagai pengoperasi sistem akuntansi keuangan daerah diharuskan memiliki pemahaman yang baik akan sistem tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugeng (2014) menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini

menggunakan sampel semua unit satuan kerja pemerintah daerah yang ada di kabupaten Kediri. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 140 orangresponden dari 30 unit satuan kerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kabupaten Kediri untuk masalah pemahaman akan sistem akuntansi keuangan daerah masih kurang. Kendalanya dapat berupa untuk pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan lebih rumit karena menghasilkan laporan keuangan yang lebih banyak. Sehingga dalam penelitian ini akan melihat pada sisi cakupan yang lebih sempit dari pengelolaan keuangan daerah yaitu penyaluran Alokasi Dana Desa dilihat pada sisi efektivitasnya.



Gambar II.2
Kerangka Teoritik

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Dari pembahasan dalam kerangka teoritik tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa

H₂: Struktur birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa

H₃: Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan selalu memiliki tujuan yang diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan baru, baik bagi pihak terkait maupun pembaca. Berdasarkan penjabaran pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumedang.
2. Mengetahui pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumedang.
3. Mengetahui pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumedang.

B. Tempat dan Waktu Penelitian atau Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada desa yang terdapat di Kabupaten Sumedang sebagai objek penelitian. Terdapat 270 desa yang ada di Kabupaten Sumedang. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumedang.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik (Musianto, 2002). Menurut Kadir (2015), dalam penelitian kuantitatif masalah utama (*mayor*) penelitian adalah variabel yang menjadi tema pokok penelitian. Masalah utama penelitian biasanya melekat pada variabel terikat (*dependent variable*) yang sifatnya dikuantifikasi, diukur atau diamati (*measureable*).

Ditinjau dari segi masalah yang diteliti, teknik dan alat yang digunakan penelitian ini menggunakan dua metode pengambilan data yaitu :

1. *Literature reviews*, yaitu mencari dan mengumpulkan data dari literature yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa teori-teori yang berasal dari

literature-literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, data ini diperoleh melalui jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku, dengan maksud untuk melengkapi data primer yang ada di lapangan.

2. Survey, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara personal. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner (angket) tertutup, yaitu angket yang digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan variabel independen dan variabel dependen. Data yang dikumpulkan berasal dari jawaban langsung dari aparaturnya.

D. Populasi dan Sampling atau Jenis dan Sumber Data

Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diamati atau ukuran yang diperoleh dari seluruh individu atau objek yang terkait (Lind, et al., 2014). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Sumedang tahun 2016 yang berjumlah 270 desa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik *random sampling* dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

Rumus Slovin:
$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d = galat pendugaan

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 270 desa dan presisi yang ditetapkan untuk penelitian dibidang ilmu sosial atau tingkat signifikansi 0,05, maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah :

$$n = \frac{270}{1 + (270 \times 0,05^2)}$$

$$= 161,194 \text{ dibulatkan menjadi } 161$$

Sehingga didapatkan jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 161 desa.

E. Teknik Pengumpulan Data atau Operasionalisasi Variabel Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh sumber daya manusia, struktur birokrasi, dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Berikut variabel-variabel operasional yang akan diuji

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Kadir, 2015). Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Berikut definisi secara konseptual dan operasional:

a. Definisi Konseptual

Menurut Permendagri 113/2014 Pasal 1 Ayat 10, Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus. Efektivitas merupakan hasil yang dicapai pekerja dibandingkan jumlah hasil produksi lain dengan jangka waktu tertentu. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan (Sipayung, 2014).

b. Definisi Operasional

Pernyataan dalam kuesioner untuk variabel ini diukur dengan menggunakan skala *Likert*, yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2011). Variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa menggunakan indikator (Sipayung, 2014):

- 1) Ketepatan sasaran.
- 2) Ketepatan waktu.
- 3) Tercapainya tujuan.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel lain (Kadir, 2015). Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini, yaitu:

2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Definisi Konseptual

Menurut Winarno (2002) dalam Prasetyo (2015) menyebutkan bahwa sumber daya manusia atau sumber daya organisasi adalah sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan program Alokasi

Dana Desa yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai keterampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas. Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Wansyah, et al., 2012 dalam Riawan, 2016). Kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual atau kejuangan (Danim, 1996 dalam Pamungkas, 2015).

b. Definisi Operasional

Pernyataan dalam kuesioner untuk variabel ini diukur dengan menggunakan skala *Likert*, yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2011). Variabel kualitas sumber daya manusia menggunakan indikator (Riawan, 2016 dan Pamungkas, 2015):

- 1) Keterampilan.
- 2) Latar belakang pendidikan.
- 3) Mengikuti pendidikan atau pelatihan.
- 4) Pengalaman.

2.2 Struktur Birokrasi

a. Definisi Konseptual

Struktur birokrasi, yaitu kerangka yang merupakan visualisasi dari tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab, serta batas-batas formal jabatan (Ariyani, et al., 2014).

b. Definisi Operasional

Pernyataan dalam kuesioner untuk variabel ini diukur dengan menggunakan skala *Likert*, yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2011). Variabel struktur birokrasi menggunakan indikator (Ariyani, et al., 2014):

- 1) Hirarki.
- 2) Tugas-tugas.
- 3) Wewenang.
- 4) Tanggungjawab.

2.3 Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

a. Definisi Konseptual

Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pemahaman serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Halim (2012) dalam Usman dan Lukman (2014) menjelaskan sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas lima prosedur akuntansi, yaitu akuntansi penerimaan

kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, akuntansi aset, dan penyajian laporan keuangan.

b. Definisi Operasional

Pernyataan dalam kuesioner untuk variabel ini diukur dengan menggunakan skala *Likert*, yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2011). Variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan indikator (Usman dan Lukman, 2014):

- 1) Pemahaman Prosedur akuntansi penerimaan kas.
- 2) Pemahaman Prosedur akuntansi pengeluaran kas.
- 3) Pemahaman Prosedur akuntansi selain kas.
- 4) Pemahaman Prosedur akuntansi aset.
- 5) Pemahaman Penyajian laporan keuangan.

Tabel III.1

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator	Butir Pernyataan
1	Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (Y) (Sipayung, 2014)	Efektivitas merupakan hasil yang dicapai dengan jangka waktu tertentu, hubungan antara <i>output</i> dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi,	Ketepatan Sasaran	26, 29
			Ketepatan Waktu	25
			Tercapainya Tujuan	24, 27, 28

		program, atau kegiatan.		
2	Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) (Riawan, 2016 dan Pamungkas, 2015)	Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.	Keterampilan	3
			Latar Belakang Pendidikan	1, 2
			Mengikuti Pendidikan atau Pelatihan	4, 5
			Pengalaman	6
3	Struktur Birokrasi (X2) (Ariyani, et al., 2014)	Struktur birokrasi, yaitu kerangka yang merupakan visualisasi dari tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab, serta batas-batas formal jabatan.	Hirarki	11
			Tugas-tugas	7, 8, 9, 14
			Wewenang	12
			Tanggungjawab	10, 13
4	Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) (Usman dan Lukman, 2014)	Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah merupakan ketepatan dalam melakukan serangkaian prosedur mulai dari akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, akuntansi aset, dan penyajian laporan keuangan.	Pemahaman Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas	16
			Pemahaman Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas	17
			Pemahaman Prosedur Akuntansi Selain Kas	19
			Pemahaman Prosedur Akuntansi Aset	18
			Pemahaman Penyajian Laporan Keuangan	15, 20, 21, 22, 23

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif adalah teknik yang hanya berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyajian sebagian atau seluruh data (pengamatan) tanpa pengambilan kesimpulan (Kadir, 2015). Statistika deskriptif menurut Lind (2014) adalah metode mengelola, meringkas, dan menyajikan data secara informatif. Dalam penelitian ini dilakukan penyajian data statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai kondisi demografi responden (jenis kelamin, usia, serta pendidikan terakhir).

2. Uji Kualitas Data

2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Sunyoto, 2011). Mengukur tingkat validitas dapat dilakukan dengan tiga cara:

- a. Melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dan total skor konstruk.
- b. Uji validitas dapat juga dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor.
- c. Uji analisis dengan faktor, digunakan untuk menguji apakah butir-butir pertanyaan yang digunakan dapat mengonfirmasi sebuah konstruk.

Pengujian ini dengan cara melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan skor konstruk, dimana suatu instrumen dikatakan valid apabila koefisien korelasi r -hitung $>$ koefisien korelasi r -tabel dengan tingkat signifikansi 0,05.

2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Sunyoto, 2011). Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Pengukur reliabilitas dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Repeated measure* atau pengukuran ulang. Dalam waktu yang berbeda, seorang karyawan/responden diberi butir pertanyaan dikatakan andal jika jawabannya sama.
- b. *One shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran keandalan butir pernyataan dengan sekali menyebarkan kuisioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antarskor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer SPSS, dengan fasilitas *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $>$ 0,60.

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha* untuk menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan.

3. Uji Asumsi Klasik

Pemenuhan asumsi klasik dimaksudkan agar dalam pengerjaan model regresi tidak menemukan masalah masalah statistik, serta model regresi yang dihasilkan dapat memenuhi standar statistik sehingga parameter yang diperoleh logis dan masuk akal (Gani & Siti, 2015).

3.1 Uji Normalitas

Menurut Kadir (2015) pengujian asumsi distribusi normal bertujuan untuk mempelajari apakah sampel yang terpilih berasal dari distribusi sebuah distribusi populasi normal atau tak normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Analisis tentang distribusi normal merupakan analisis pendahuluan dan menjadi prasyarat apakah suatu teknik analisis statistika dapat digunakan untuk menguji hipotesis (Kadir, 2015). Uji normalitas yang digunakan yaitu *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada alpha sebesar 5%. Jika nilai signifikansi dari pengujian K-S lebih besar dari 0,05 berarti data berdistribusi normal.

3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan linear yang erat antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik harus bebas dari gejala multikolinearitas (Gani & Siti, 2015). Dalam menentukan ada tidaknya multikolinearitas, dapat digunakan cara (Sunyoto, 2011):

- a. Nilai *tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (a).
- b. Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Nilai *tolerance* (a) dan VIF dapat dicari dengan menggabungkan kedua nilai tersebut sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai *tolerance* (a):

$$a = 1 / \text{VIF}$$

- b. Besar nilai VIF:

$$\text{VIF} = 1/a$$

Variabel bebas mengalami multikolinearitas jika $a \text{ hitung} < a$ dan $\text{VIF hitung} > \text{VIF}$.

3.3 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah kondisi dimana varian dari nilai sisa tidak sama (*unequal*) antara satu observer (pengamatan) dengan observer lainnya (Gani & Siti, 2015). Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah data mempunyai variansi yang tidak sama di antara data tersebut. Variabel dinyatakan homoskedastisitas jika penyebaran titik-titik observer di atas atau di bawah angka nol pada sumbu Y mengarah pada satu pola yang jelas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Jika skala pengukuran dari tiga variabel bebas (*predictor*) dan sebuah variabel bebas (*criterion*) yang akan dianalisis merupakan interval atau rasio maka untuk menjelaskan pengaruh/hubungan antara variabel tersebut dapat dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan tiga prediktor (Kadir,2015). Hubungan atau pertautan antara variabel tersebut dinyatakan dalam persamaan matematika berikut:

$$ADD = \alpha + \beta_1SDM + \beta_2BIRO + \beta_3AKT + \varepsilon$$

Keterangan:

ADD : Efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa

SDM : Kualitas sumber daya manusia

BIRO : Struktur birokrasi

AKT : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

α : konstanta

ε : tingkat kesalahan

5. Uji Hipotesis

5.1 Uji Parsial (Uji-t)

Andaikan kita ingin mengetahui apakah skor hasil belajar matematika pada dua kelompok yang tak independent (berkorelasi), misalkan distribusi pada pre-tes dan pos-tes maka kita dapat menguji homogenitasnya dengan menggunakan statistik uji-t. Apabila nilai t hitung lebih kecil dari t tabel maka hipotesis nol diterima (Kadir, 2015).

5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen (Ghozali, 2001). Dengan membandingkan probabilitas (pada tabel ANOVA tertulis *sig*) dengan taraf nyatanya (0,05 atau 0,01).

Jika probabilitas $> 0,05$ maka model ditolak.

Jika probabilitas $< 0,05$ maka model diterima.

5.3 Koefisiensi Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2001).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Hasil Pemilihan Sampel

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi, dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan data primer, dimana data diperoleh dengan cara menyebar kuesioner ke desa di Kabupaten Sumedang yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dengan total populasi keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Sumedang sebanyak 270 desa. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Urusan Keuangan (KAUR Keuangan) di setiap Desa, yang mengatur kebutuhan administratif dalam penyaluran Alokasi Dana Desa.

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini dengan teknik *random sampling* dengan menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan rumus tersebut, didapatkan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 161 desa, dengan perhitungan sebagai berikut:

Rumus Slovin:
$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d = galat pendugaan

$$n = \frac{270}{1 + (270 \times 0,05^2)}$$

= 161,194 dibulatkan menjadi 161

Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan April 2017, dengan cara mendatangi langsung kantor desa yang bersangkutan. Setiap desa diberikan satu rangkap kuesioner. Adapun persentase penyebaran dan tingkat pengembalian kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dikirim	161	100%
Kuesioner yang kembali	134	83,21%
Kuesioner yang tidak kembali	27	16,79%
Kuesioner yang dapat digunakan	113	70,19%
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	21	18,58%

Tabel IV.1 menginformasikan jumlah kuesioner yang disebar oleh peneliti sebanyak 161 pada 161 desa yang menjadi sampel penelitian. Dari 161 kuesioner yang dibagikan, kuesioner yang kembali hanya sebanyak 134 kuesioner atau 83,21% dari total kuesioner yang disebar. Setelah dilakukan pengecekan atas kuesioner yang sudah dikembalikan pada peneliti, didapatkan bahwa kuesioner yang dapat digunakan hanya sebanyak 113 kuesioner atau 70,19% dari total kuesioner. Hal tersebut dikarenakan atas kuesioner yang dikembalikan, sebanyak 21 kuesioner tidak terisi dengan lengkap. Sehingga jumlah kuesioner yang digunakan dan diolah untuk penelitian adalah sebanyak 113 kuesioner.

2. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah orang yang menangani kebutuhan administratif desa dalam melakukan penyaluran Alokasi Dana Desa. KAUR Keuangan merupakan orang yang berwenang dan bertugas untuk menangani kebutuhan administratif penyaluran Alokasi Dana Desa, sehingga dalam penelitian ini responden yang diteliti atau objek penelitian adalah KAUR Keuangan dari masing-masing desa sampel penelitian. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 113 orang dengan karakteristik jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir.

Tabel IV.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	66	58,41%
2.	Perempuan	47	41,59%
TOTAL		113	100%

Tabel IV.2 menunjukkan proporsi jenis kelamin responden dalam penelitian ini. Dari 113 kuesioner yang dapat digunakan, responden dengan jenis kelamin laki-laki memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan responden perempuan yaitu 58,41% atau sebanyak 66 orang dari total responden berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 47 orang atau 41,59% dari total responden.

Tabel IV.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Rentang Usia	Jumlah	Persentase
1.	21-30 Tahun	23	20,35%
2.	31-40 Tahun	42	37,17%
3.	41-50 Tahun	33	29,20%
4.	> 50 Tahun	15	13,28%
TOTAL		113	100%

Tabel IV.3 bertujuan untuk mengetahui usia responden dalam penelitian ini. Di tabel ini usia responden diklasifikasikan menjadi 4 golongan. Untuk golongan pertama, responden dengan usia 21-30 tahun berjumlah 23 orang atau 20,35% dari total responden. Golongan kedua, responden dengan usia 31-40 tahun menjadi golongan dengan jumlah terbanyak yaitu 42 orang atau sekitar 37,17% dari total responden. Sedangkan untuk golongan ketiga, responden dengan usia 41-50 tahun berjumlah 33 orang atau sebesar 29,20% dari total responden. Dan golongan keempat, responden dengan usia diatas 50 tahun berjumlah 15 orang atau sebesar 13,28% dari total responden.

Tabel IV.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1.	SMP/Sederajat	2	1,77%
2.	SMA/Sederajat	80	70,80%
3.	Diploma 3	11	9,73%
4.	Strata 1	20	17,70%
TOTAL		113	100%

Tabel IV.4 bertujuan untuk mengetahui tingkat pendidikan terakhir dari responden penelitian ini. Responden dengan pendidikan terakhir SMP/ sederajat memiliki jumlah terendah yaitu 2 orang atau 1,77% dari total responden.

Responden dengan pendidikan terakhir SMA/ sederajat memiliki jumlah tertinggi dengan responden sebanyak 80 orang atau sebesar 70,80% dari total responden. Untuk responden dengan pendidikan terakhir Diploma 3 berjumlah 11 orang atau sekitar 9,73% dari total responden. Sedangkan untuk responden dengan pendidikan terakhir Strata 1 memiliki jumlah sebanyak 20 orang atau 17,70% dari total responden. Latar belakang pendidikan terakhir tersebut dapat memahami kualitas sumber daya manusia yang melakukan dan mengelola administratif penyaluran Alokasi Dana Desa.

3. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa, kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi, dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah. Analisis penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil jawaban responden yang terdiri dari 29 butir pernyataan. Analisis statistik deskriptif dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program teknologi komputer yaitu program aplikasi IBM *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 22. Berikut merupakan hasil statistik deskriptif dari jawaban pernyataan responden yang menjadi sampel penelitian ini:

Tabel IV.5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa	113	19	30	24,64	2,659
Kualitas Sumber Daya Manusia	113	18	27	22,72	2,177
Struktur Birokrasi	113	27	39	33,27	2,934
Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	113	28	45	35,11	3,180
Valid N (listwise)	113				

Tabel IV.5 diatas memberikan informasi mengenai masing-masing variabel independen dan dependen yang akan diuji dalam penelitian ini. Berikut ini akan dijelaskan analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel:

- a. Variabel Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa menggunakan enam butir pernyataan dengan rentang skor yang dapat diberikan untuk masing-masing pernyataan adalah 1-5. Dari keseluruhan jawaban responden, nilai terendah sebesar 19 dan nilai tertinggi sebesar 30. Berdasarkan tabel IV.5 terlihat besarnya nilai rata-rata variabel ini adalah 24,64. Nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum menunjukkan bahwa desa tempat para responden bekerja cukup efektif dalam penyaluran Alokasi Dana Desa nya. Selain itu, nilai standar

deviasi yang dimiliki variabel ini yaitu sebesar 2,659. Nilai standar deviasi menunjukkan heterogenitas yang terjadi dalam data yang sedang diteliti atau untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke rata-rata nilai sampel. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan untuk merepresentasikan keseluruhan data.

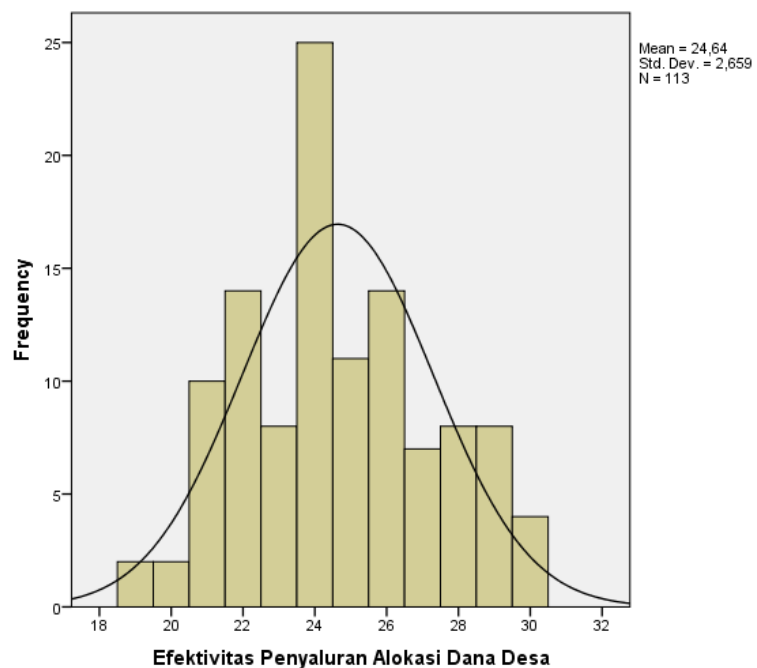
Tabel IV.6
Distribusi Frekuensi Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 19-20,4	4	3,5	3,5	3,5
20,5-21,9	10	8,8	8,8	12,4
22-23,3	22	19,5	19,5	31,9
23,4-24,8	25	22,1	22,1	54,0
24,9-26,3	25	22,1	22,1	76,1
26,4-27,8	7	6,2	6,2	82,3
27,9-29,3	16	14,2	14,2	96,5
29,4-30,7	4	3,5	3,5	100,0
Total	113	100,0	100,0	

Distribusi frekuensi data efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tabel IV.6, dimana rentang skor adalah 11, banyak kelas adalah 8 dan panjang interval kelas adalah 1,4. Berdasarkan tabel IV.6 dapat dilihat bahwa frekuensi kelas tertinggi variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa, yaitu 25 yang terletak pada interval

keempat dan kelima yakni antara 23,4-24,8 dan 24,9-26,3 dengan persentase frekuensi sebesar 22,1%. Sementara frekuensi rendahnya, yaitu 4 yang terletak pada interval pertama dan kedelapan yakni antara 19-20,4 dan 29,4-30,7 dengan persentase frekuensi sebesar 3,5%.

Untuk mempermudah penafsiran data frekuensi absolut efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa maka dapat ini digambarkan dalam grafik histogram sebagai berikut:



Gambar IV.1
Grafik Histogram Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

- b. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia menggunakan enam butir pernyataan dengan rentang skor yang dapat diberikan untuk masing-masing pernyataan adalah 1-5. Dari keseluruhan jawaban responden, nilai terendah sebesar 18 dan nilai tertinggi sebesar 27. Besarnya nilai rata-rata variabel ini adalah 22,72 yaitu skor yang cukup tinggi.

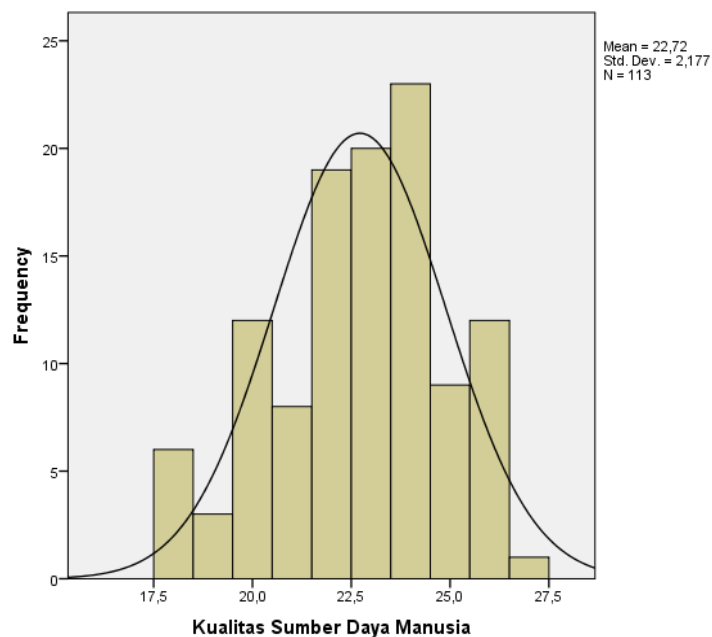
Namun dapat dilihat bahwa nilai tertinggi dari variabel ini tidak mencapai nilai maksimum yang bisa didapat yaitu 30. Hal ini dapat menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki kualitas yang tidak cukup baik namun juga tidak buruk. Sedangkan nilai standar deviasi dari variabel ini adalah sebesar 2,177. Nilai standar deviasi menunjukkan keheterogenan yang terjadi dalam data yang sedang diteliti atau untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke rata-rata nilai sampel. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan untuk merepresentasikan keseluruhan data.

Tabel IV.7
Distribusi Frekuensi Kualitas Sumber Daya Manusia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 18-19,1	9	8,0	8,0	8,0
19,2-20,4	12	10,6	10,6	18,6
20,5-21,6	8	7,1	7,1	25,7
21,7-22,8	19	16,8	16,8	42,5
22,9-24,1	43	38,1	38,1	80,5
24,2-25,3	9	8,0	8,0	88,5
25,4-26,5	12	10,6	10,6	99,1
26,6-27,7	1	,9	,9	100,0
Total	113	100,0	100,0	

Distribusi frekuensi data kualitas sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel IV.7, dimana rentang skor adalah 9, banyak kelas adalah 8 dan panjang interval kelas adalah 1,1. Berdasarkan tabel IV.7 dapat dilihat bahwa frekuensi kelas tertinggi variabel kualitas sumber daya manusia, yaitu 43 yang terletak pada interval kelima yakni antara 22,9-24,1 dengan persentase frekuensi sebesar 38,1%. Sementara frekuensi rendahnya, yaitu 1 yang terletak pada interval kedelapan yakni antara 26,6-27,7 dengan persentase frekuensi sebesar 0,9%.

Untuk mempermudah penafsiran data frekuensi absolut kualitas sumber daya manusia maka dapat ini digambarkan dalam grafik histogram sebagai berikut:



Gambar IV.2
Grafik Histogram Kualitas Sumber Daya Manusia

c. Variabel Struktur Birokrasi menggunakan delapan butir pernyataan dengan rentang skor yang dapat diberikan untuk masing-masing pernyataan adalah 1-5. Dari keseluruhan jawaban responden, nilai terendah sebesar 27 dan nilai tertinggi sebesar 39, mendekati nilai maksimumnya yaitu 40. Besarnya nilai rata-rata variabel ini adalah 33,27. Dilihat dari nilai rata-ratanya yang cukup tinggi salah satu penyebabnya bisa dikarenakan struktur birokrasi dalam penyaluran Alokasi Dana Desa cukup mudah dipahami dan dijalankan oleh yang menjadi responden dalam penelitian ini, sehingga dapat membantu terciptanya efektivitas dalam penyaluran Alokasi Dana Desa tersebut. Variabel ini memiliki nilai standar deviasi 2,934. Nilai standar deviasi menunjukkan keheterogenan yang terjadi dalam data yang sedang diteliti atau untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke rata-rata nilai sampel. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan untuk merepresentasikan keseluruhan data.

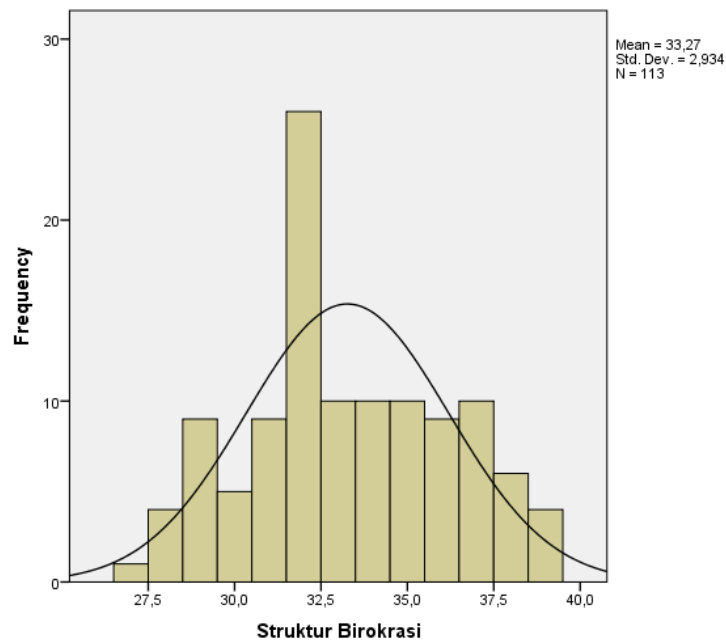
Tabel IV.8
Distribusi Frekuensi Struktur Birokrasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 27-28,5	5	4,4	4,4	4,4
28,6-30,1	14	12,4	12,4	16,8
30,2-31,7	9	8,0	8,0	24,8
31,8-33,3	36	31,9	31,9	56,6

33,4-34,9	10	8,8	8,8	65,5
35-36,5	19	16,8	16,8	82,3
36,6-38,1	16	14,2	14,2	96,5
38,2-39,7	4	3,5	3,5	100,0
Total	113	100,0	100,0	

Distribusi frekuensi data struktur birokrasi dapat dilihat pada tabel IV.8, dimana rentang skor adalah 12, banyak kelas adalah 8 dan panjang interval kelas adalah 1,5. Berdasarkan tabel IV.8 dapat dilihat bahwa frekuensi kelas tertinggi variabel struktur birokrasi, yaitu 36 yang terletak pada interval keempat yakni antara 31,8-33,3 dengan persentase frekuensi sebesar 31,9%. Sementara frekuensi rendahnya, yaitu 4 yang terletak pada interval kedelapan yakni antara 38,2-39,7 dengan persentase frekuensi sebesar 3,5%.

Untuk mempermudah penafsiran data frekuensi absolut struktur birokrasi maka dapat ini digambarkan dalam grafik histogram sebagai berikut:



Gambar IV.3
Grafik Histogram Struktur Birokrasi

- d. Variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menggunakan sembilan butir pernyataan dengan rentang skor yang dapat diberikan untuk masing-masing pernyataan adalah 1-5. Dari keseluruhan jawaban responden, nilai terendah sebesar 28 dan nilai tertinggi sebesar 45. Variabel ini memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 35,11. Meskipun terdapat beberapa butir pernyataan yang memiliki nilai rendah, namun secara keseluruhan responden dapat memahami sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan pada desa tempatnya bekerja. Dari tabel IV.5 juga dapat dilihat bahwa variabel ini memiliki nilai standar deviasi paling tinggi yaitu 3,180. Nilai standar deviasi menunjukkan keheterogenan yang terjadi dalam data yang sedang diteliti atau untuk menentukan bagaimana sebaran data

dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke rata-rata nilai sampel. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan untuk merepresentasikan keseluruhan data.

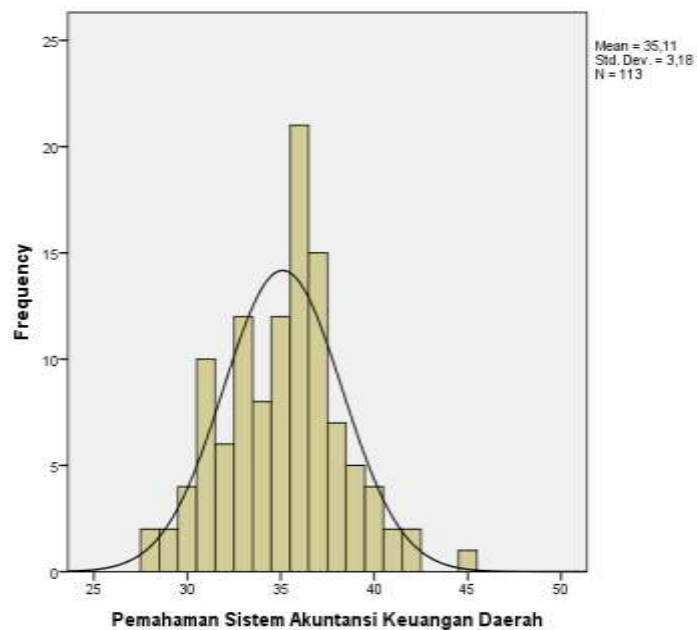
Tabel IV.9
Distribusi Frekuensi Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 28-30,1	8	7,1	7,1	7,1
30,2-32,4	16	14,2	14,2	21,2
32,5-34,6	20	17,7	17,7	38,9
34,7-36,8	33	29,2	29,2	68,1
36,9-39	27	23,9	23,9	92,0
39,1-41,3	6	5,3	5,3	97,3
41,4-43,5	2	1,8	1,8	99,1
43,6-45,7	1	,9	,9	100,0
Total	113	100,0	100,0	

Distribusi frekuensi data pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilihat pada tabel IV.9, dimana rentang skor adalah 17, banyak kelas adalah 8 dan panjang interval kelas adalah 2,1. Berdasarkan tabel IV.9 dapat dilihat bahwa frekuensi kelas tertinggi variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, yaitu 33 yang terletak pada interval keempat yakni antara 34,7-36,8 dengan persentase frekuensi sebesar 29,2%. Sementara frekuensi rendahnya,

yaitu 1 yang terletak pada interval kedelapan yakni antara 43,6-45,7 dengan persentase frekuensi sebesar 0,9%.

Untuk mempermudah penafsiran data frekuensi absolut pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah maka dapat ini digambarkan dalam grafik histogram sebagai berikut:



Gambar IV.4
Grafik Histogram Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

B. Pengujian Hipotesis

1. Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data dalam penelitian ini menggunakan 21 responden yang berasal dari luar sampel penelitian yaitu masing-masing satu desa di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan dua tahapan pengujian kualitas data, yaitu uji

validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan guna mengukur tingkat validitas dari setiap butir pernyataan dalam kuesioner yang akan diajukan pada responden dalam penelitian ini, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk menguji reliabilitas atau keandalan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Adapun jumlah pernyataan yang akan dilakukan uji adalah sebanyak 34 butir pernyataan dan menggunakan 4 variabel penelitian, yaitu Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (Y), Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1), Struktur Birokrasi (X_2), dan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3).

1.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan cara melakukan korelasi antara skor butir pernyataan dengan skor konstruk. Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 21 responden dengan 34 butir pernyataan. Jumlah 34 butir pernyataan terbagi atas 6 butir pernyataan variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa, 9 butir pernyataan variabel kualitas sumber daya manusia, 9 butir pernyataan variabel struktur birokrasi, dan 10 butir pernyataan variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah.

Dalam pengujian ini suatu instrumen dikatakan valid apabila koefisien korelasi r -hitung lebih besar dari koefisien korelasi r -tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 dan menggunakan uji dua sisi (*two tailed*). Nilai r -tabel didapatkan dengan menghitung nilai *degree of freedom* (df) terlebih dahulu. Nilai df didapatkan dengan cara jumlah

seluruh responden dikurangi 2 ($n-2$). Dengan jumlah responden yang sebanyak 21, maka didapatkan nilai df nya yaitu 19. Pada tabel dengan nilai signifikansi 0,05 dan df 19, didapatkan nilai r -tabel yaitu sebesar 0,4329. Sehingga pernyataan yang diajukan dalam kuesioner akan dinyatakan valid apabila memiliki nilai r -hitung lebih besar dari 0,4329. Nilai r -hitung dapat dilihat dari nilai *pearson correlation* pada total skor masing-masing variabel.

Hasil dari pengujian validitas ini menunjukkan bahwa terdapat 5 butir pernyataan kuesioner tidak valid yang terdiri dari 3 butir pernyataan variabel kualitas sumber daya manusia, 1 butir pernyataan variabel struktur birokrasi, dan 1 butir pernyataan variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil pengujian didapatkan menggunakan program IBM SPSS versi 22 dengan detail sebagai berikut (hasil pengolahan data di lampiran):

Tabel IV.10

Perbandingan r -hitung dan r -tabel

Nomor Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0,617	0,4329	VALID
2	0,562	0,4329	VALID
3	0,429	0,4329	DROP
4	0,522	0,4329	VALID
5	0,253	0,4329	DROP
6	0,569	0,4329	VALID
7	0,468	0,4329	VALID
8	0,806	0,4329	VALID
9	0,329	0,4329	DROP
10	0,588	0,4329	VALID
11	0,564	0,4329	VALID

12	0,647	0,4329	VALID
13	0,261	0,4329	DROP
14	0,685	0,4329	VALID
15	0,487	0,4329	VALID
16	0,470	0,4329	VALID
17	0,584	0,4329	VALID
18	0,709	0,4329	VALID
19	0,652	0,4329	VALID
20	0,782	0,4329	VALID
21	0,825	0,4329	VALID
22	0,795	0,4329	VALID
23	0,634	0,4329	VALID
24	0,597	0,4329	VALID
25	0,421	0,4329	DROP
26	0,556	0,4329	VALID
27	0,742	0,4329	VALID
28	0,748	0,4329	VALID
29	0,906	0,4329	VALID
30	0,699	0,4329	VALID
31	0,442	0,4329	VALID
32	0,905	0,4329	VALID
33	0,660	0,4329	VALID
34	0,633	0,4329	VALID
Status	Jumlah	Persentase	
DROP	5	0,147	14,7%
VALID	29	0,853	85,3%
Diperkenankan karena pernyataan kuesioner yang valid diatas 70%			

1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Setiap butir pernyataan dapat dikatakan reliabel atau andal apabila jawaban dari responden pada variabel tersebut konsisten. Pada pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha* masing-masing variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,60.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60. Maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel. Hasil dari pengujian ini dibantu program IBM SPSS versi 22 yang akandisajikan dalam lampiran, dengan rincian sebagai berikut (hasil pengolahan data di lampiran):

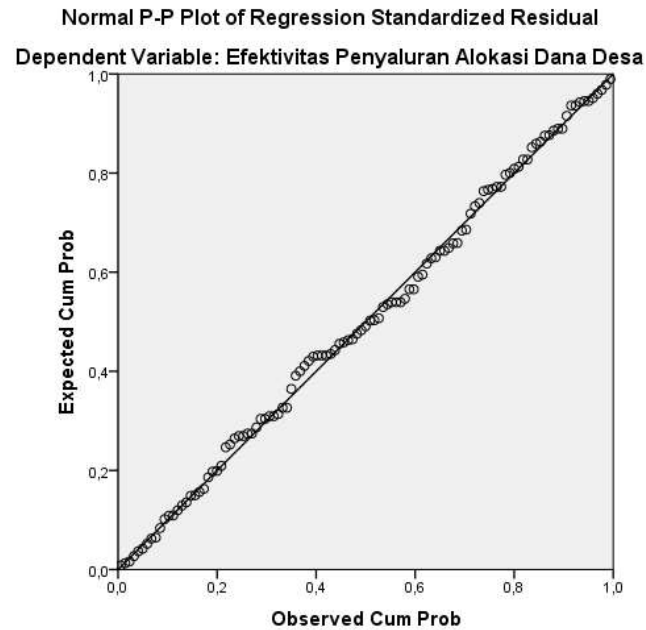
Tabel IV.11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa	0,795	Reliabel
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,703	Reliabel
Struktur Birokrasi	0,718	Reliabel
Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,808	Reliabel

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam pengujian ini diperlukan adanya pemenuhan asumsi klasik agar dalam pengerjaan model regresi tidak menemukan masalah statistik. Model regresi juga dikatakan baik apabila penyebaran datanya normal atau berdistribusi normal. Selain itu, setiap variabel juga harus tidak memiliki keterkaitan dan kesamaan varian. Oleh karena itu, dalam pengujian asumsi klasik ini digunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

2.1 Uji Normalitas



Gambar IV.5
Grafik *P-Plot* Uji Normalitas

Dalam gambar IV.5 hasil olahan menggunakan program IBM SPSS versi 22 ini dapat dilihat bahwa titik-titik distribusi data mendekati garis diagonal dan memiliki penyebaran data yang searah dengan garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Sehingga syarat pertama pemenuhan asumsi klasik telah terpenuhi untuk dapat menggunakan model regresi.

Selain dengan menggunakan gambar, pengujian normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Berikut adalah hasil pengujian normalitas dengan *One-*

Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) menggunakan IBM SPSS versi 22:

Tabel IV.12

Hasil *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		113
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,21641379
Most Extreme Differences	Absolute	,039
	Positive	,037
	Negative	-,039
Test Statistic		,039
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi dari pengujian K-S lebih besar dari 0,05. Dalam tabel IV.12 didapatkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,200. Nilai ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05.

2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian asumsi klasik berikutnya setelah uji normalitas adalah uji multikolinearitas, dimana uji ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear yang erat antar variabel independen dalam model regresi. Berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas menggunakan program IBM SPSS versi 22:

Tabel IV.13
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kualitas Sumber Daya Manusia	,785	1,274
Struktur Birokrasi	,635	1,575
Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,686	1,458

a. Dependent Variable: Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

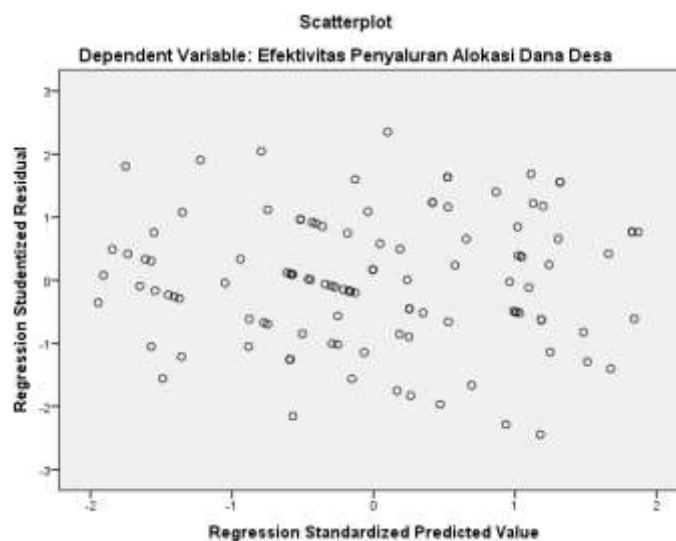
Suatu data dikatakan tidak terdapat multikolinearitas apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Tabel IV.13 menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga untuk

pengujian asumsi klasik kedua terpenuhi, bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji asumsi klasik yang terakhir adalah uji heterokedastisitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah data mempunyai variansi yang tidak sama di antara data tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* dan uji *glejser*.

Dengan pengujian menggunakan grafik *scatterplot*, jika titik-titik observer tersebar di atas atau di bawah angka nol pada sumbu Y mengarah pada satu pola yang jelas maka data dinyatakan homokedastisitas atau terbebas dari heterokedastisitas. Berikut merupakan hasil uji heterokedastisitas dengan grafik *scatterplot* menggunakan program IBM SPSS versi 22:



Gambar IV.6
Grafik *Scatterplot*

Gambar IV.6 menunjukkan bahwa titik-titik observer data menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, namun masih ada beberapa titik yang membentuk pola. Berikutnya pengujian heterokedastitas akan diuji dengan uji *glejser*.

Tabel IV.14
Hasil Uji *Glejser*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,536	1,736		-,308	,758
	Kualitas Sumber Daya Manusia	-,072	,065	-,116	-1,097	,275
	Struktur Birokrasi	,102	,054	,223	1,897	,060
	Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,015	,048	,035	,307	,760

a. Dependent Variable: RES2

Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastitas. Dari tabel IV.14 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi seluruh variabel dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05. Dengan demikian maka data dalam penelitian ini tidak mengandung heterokedastitas. Oleh karena itu, seluruh pengujian asumsi klasik telah terpenuhi, sehingga penelitian ini dapat menggunakan dan menghasilkan model regresi yang baik.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, berikutnya adalah melakukan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menjelaskan pengaruh atau hubungan antara variabel dependen dan independen dalam penelitian. Berikut adalah hasil pengujian untuk analisis regresi linear berganda menggunakan program IBM SPSS versi 22:

Tabel IV.15
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,495	2,928		1,877	,063
	Kualitas Sumber Daya Manusia	,062	,110	,051	,564	,574
	Struktur Birokrasi	,341	,091	,376	3,756	,000
	Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,182	,081	,217	2,256	,026

a. Dependent Variable: Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

Dalam tabel IV.15 dapat dilihat nilai koefisiensi (B) dari masing-masing variabel independen dalam penelitian ini. Nilai koefisiensi variabel independen tersebut secara berturut-turut adalah sebesar 0,062 untuk variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, 0,341 untuk variabel Struktur

Birokrasi, dan 0,182 untuk variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Nilai koefisiensi tersebut kemudian dibuat dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$ADD = 5,495 + 0,062SDM + 0,341BIRO + 0,182AKT + \varepsilon$$

Keterangan:

ADD : Efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa

SDM : Kualitas sumber daya manusia

BIRO : Struktur birokrasi

AKT : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

α : konstanta

ε : tingkat kesalahan

Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 5,495 artinya jika semua variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka nilai efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa akan bernilai 5,495.
- b. Nilai koefisien kualitas sumber daya manusia adalah sebesar 0,062 menunjukkan tanda positif. Hal ini menggambarkan bahwa ketika kualitas sumber daya manusia naik 1 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menaikkan efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa sebesar 0,062.
- c. Nilai koefisien struktur birokrasi adalah sebesar 0,341 menunjukkan tanda positif. Hal ini menggambarkan bahwa ketika

struktur birokrasi naik 1 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menaikkan efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa sebesar 0,341.

- d. Nilai koefisiensi pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 0,182 menunjukkan tanda positif. Hal ini menggambarkan bahwa ketika pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah naik 1 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menaikkan efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa sebesar 0,182.

4. Uji Hipotesis

4.1 Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau terpisah. Uji-t dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel dan juga berdasarkan nilai signifikansinya. Dalam penelitian ini df ($n-k-1$) yang dihasilkan sebesar 109 ($113-3-1$), dimana n sebesar 113 adalah jumlah responden dan k sebesar 3 adalah jumlah variabel independen dalam penelitian ini. Dengan nilai df 109 dan signifikansi 0,05, maka nilai t-tabel adalah 1,984. Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen menggunakan kriteria pengujian, yaitu apabila nilai t-hitung $>$ t-tabel atau nilai

signifikansi $< 0,05$. Berikut adalah hasil pengujian uji-t dengan menggunakan program IBM SPSS versi 22:

Tabel IV.16

Hasil Uji-t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,495	2,928		1,877	,063
	Kualitas Sumber Daya Manusia	,062	,110	,051	,564	,574
	Struktur Birokrasi	,341	,091	,376	3,756	,000
	Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,182	,081	,217	2,256	,026

a. Dependent Variable: Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

- a. Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Berdasarkan tabel IV.16 dapat dilihat bahwa nilai t-hitung sebesar $0,564 < t$ -

tabel 1,984, sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa.

- b. Hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa struktur birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Hasil uji-t dalam tabel IV.16 menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar $3,756 > t\text{-tabel } 1,984$, sehingga H_2 diterima dan H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa.
- c. Hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Berdasarkan hasil uji-t pada tabel IV.16 terlihat bahwa nilai t-hitung sebesar $2,256 > t\text{-tabel } 1,984$ sehingga H_3 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa.

4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji-F digunakan untuk menguji secara bersama-sama hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengukuran yang dipakai adalah dengan membandingkan nilai F-tabel dengan F-

hitung juga dengan membandingkan nilai signifikansinya. Dengan responden sebanyak 113 dan tingkat kepercayaan 95% maka didapat nilai F-tabel sebesar 2,69. tingkat kepercayaan 95% maka didapat nilai F-tabel sebesar 2,69. Oleh karena itu, dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

H_0 : semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H_a : semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen

Berikut ini hasil uji-F yang telah diolah menggunakan program IBM SPSS versi 22:

Tabel IV.17
Hasil Uji-F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	241,925	3	80,642	15,976	,000 ^b
	Residual	550,199	109	5,048		
	Total	792,124	112			

a. Dependent Variable: Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil uji-F pada tabel IV.17 terlihat bahwa nilai F-hitung sebesar $15,976 > F\text{-tabel sebesar } 2,69$, dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Dengan demikian maka H_a diterima

dan H_0 ditolak. Sehingga hasil dari uji-F menyatakan bahwa semua variabel independen (kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi, dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa).

4.3 Koefisiensi Determinasi (R^2)

Koefisiensi determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *adjusted R square* yang semakin tinggi (mendekati satu) menunjukkan bahwa semakin kuat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Adapun hasil pengujian koefisiensi determinasi menggunakan program IBM SPSS versi 22 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.18
Hasil Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,553 ^a	,305	,286	2,247

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Struktur Birokrasi

b. Dependent Variable: Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil pada tabel IV.18 diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,286 atau 28,6% yang berarti bahwa 28,6% dari

efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam penelitian ini yakni kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi, dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah. sedangkan 71,4% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya diluar model regresi, diantaranya adalah sikap pelaksana, lingkungan, akuntabilitas, pengawasan internal, dan masih banyak variabel lainnya (Jurniadi, et al., 2015, Prasetyo, 2015, dan Sugeng, 2014).

C. Pembahasan

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda dengan menggunakan program IBM SPSS versi 22 untuk uji-t menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar $0,564 < t\text{-tabel } 1,984$, sehingga didapatkan hasil bahwa hipotesis pertama ditolak. Atau dapat dikatakan, variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa.

Kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting bagi suksesnya segala program kerja yang ada di desa. Dalam penelitian ini, kualitas sumber daya manusia dilihat dari sudut pandang latar belakang pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan keikutsertaan dalam pendidikan atau

pelatihan. Sumber daya manusia akan dikatakan berkualitas apabila memenuhi seluruh aspek tersebut.

Efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa bisa tercipta apabila sumber daya manusia yang mengerjakan dan mengelola syarat administratifnya berkualitas baik. Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata desa yang diteliti sudah bisa dikatakan efektif, dilihat dari hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel IV.5 dan tabel IV.6 yang menunjukkan bahwa jawaban responden dengan nilai diatas rata-rata sebesar 46%, akan tetapi memiliki kualitas sumber daya manusia yang kurang baik. Yang berarti bahwa responden dalam penelitian ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang kurang baik.

Dilihat dari deskripsi penelitiannya, responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan atau pendidikan terakhir yaitu SMA/ sederajat. Sebagai seorang yang menjabat KAUR Keuangan seharusnya dibutuhkan pemahaman yang baik setidaknya mengenai akuntansi atau ekonomi di desa. Apabila dilihat dari jawaban pada kuesionernya, banyak dari responden menjawab bahwa latar belakang pendidikan yang dimilikinya tidak sesuai dengan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Beberapa dari responden juga menjawab bahwa mereka tidak memiliki pengalaman dalam pembuatan syarat administratif untuk penyaluran Alokasi Dana Desa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak responden dalam penelitian ini adalah orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang akuntansi atau ekonomi.

Dalam suatu pemerintahan desa, Kepala Desa adalah orang yang paling berkuasa dan bertanggungjawab untuk menjalankan kegiatan desa. Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menunjuk dan mengangkat seseorang untuk bisa bekerja sebagai aparat desa, termasuk didalamnya KAUR Keuangan. Sehingga tidak ada persyaratan khusus dari pemerintah yang mewajibkan aparat desa harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sehingga wajar rasanya apabila latar belakang pendidikan dari responden dalam penelitian ini membuat penilaian akan kualitas sumber daya manusia menjadi rendah.

Meskipun berlatar belakang pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang pekerjaannya, nyatanya desa tempatnya bekerja dikatakan efektif dalam hal penyaluran Alokasi Dana Desa. Biasanya kualitas sumber daya manusia akan berbanding lurus dengan efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desanya, namun ini sebaliknya. Hal ini dikarenakan, meskipun kualitas KAUR Keuangan sebagai sumber daya manusia di pemerintahan desa dinilai kurang baik dari segi latar belakang pendidikannya, akan tetapi para aparat desa termasuk KAUR Keuangan selalu mendapatkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Setiap triwulan akan dilaksanakan penyaluran APBDes (dimana Alokasi Dana Desa termasuk didalamnya), pemerintah kecamatan dan atau pemerintah kabupaten selalu melaksanakan bimbingan teknis kepada aparat seluruh desa yang ada di Kabupaten Sumedang. Kegiatan tersebut mencakup petunjuk teknis pembuatan seluruh syarat administratif keuangan desa seperti Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran, laporan keuangan, dan hal teknis lainnya secara mendetail untuk pengajuan salah satunya penyaluran Alokasi Dana Desa. Selain itu, dalam pelatihan ini pula selain diberi pengetahuan mengenai pengerjaan berbagai macam laporan dan syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh desa, namun juga laporan ini sudah diberi contoh formatnya. Sehingga dalam pengerjaannya, aparat desa cukup melakukan penginputan informasi di desanya. Misalnya untuk laporan keuangan, format laporan keuangan sudah tersedia dan dijelaskan dalam pelatihan tersebut, sehingga pada saat pengerjaannya aparat desa hanya perlu menginput nominal pemasukan dan pengeluaran keuangan yang terjadi di desa tersebut. Aparat desa dibimbing dan dilatih dengan baik sampai dianggap paham dan mampu mengerjakan seluruh syarat administratif. Sehingga wajar meskipun dari sisi latar belakang pendidikan aparat desa kurang mumpuni, akan tetapi desa tempatnya bekerja selalu efektif dalam penyaluran Alokasi Dana Desa berkat bimbingan dan pelatihan dari pemerintah kecamatan dan atau kabupaten.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Darmiasih (2015), namun tidak mendukung penelitian Prasetyo (2015). Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan oleh perbedaan sampel dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo bersumber pada aparat desa yang bekerja di pemerintahan desa Kabupaten Rembang. Selain itu, kebijakan yang diberlakukan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa di masing-masing Kabupaten memiliki perbedaan, karena masing-masing kabupaten

selalu mengeluarkan Peraturan Bupati nya setiap tahun untuk mengatur jalannya pemerintahan daerahnya termasuk didalamnya mengenai Alokasi Dana Desa.

2. Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pengujian regresi pada variabel struktur birokrasi menghasilkan nilai t -hitung sebesar $3,756 > t$ -tabel sebesar $1,984$, sehingga didapatkan hasil bahwa hipotesis kedua diterima. Atau dapat dikatakan, variabel struktur birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Selain itu, nilai signifikansi dari variabel struktur birokrasi sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Arah koefisien dari variabel struktur birokrasi menunjukkan angka positif yang berarti bahwa semakin baik struktur birokrasi, maka akan semakin efektif juga penyaluran Alokasi Dana Desa nya. Saat seseorang merasa struktur birokrasi yang diterapkan semakin baik dan mudah dilaksanakan, maka waktu penyelesaian kerjanya akan lebih cepat dan mengakibatkan efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa yang semakin baik.

Dalam penelitian ini, struktur birokrasi diartikan sebagai visualisasi dari alur tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab dalam penyaluran Alokasi Dana Desa. Di Kabupaten Sumedang khususnya, struktur birokrasi penyaluran Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam Peraturan Bupati yang berbeda setiap tahunnya. Mulai dari syarat administrasi apa saja yang harus

dipenuhi, alur penyampaian, dan kepada siapa disampaikan. Peraturan dibuat secara rinci dan jelas, agar membantu mempermudah pelaksanaannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara struktur birokrasi dan efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan rincian yang jelas dalam peraturan yang memuat mengenai struktur birokrasi penyaluran Alokasi Dana Desa menyebabkan kemudahan bagi aparat desa untuk memenuhi syarat administrasinya. Kemudahan yang dirasakan aparat dalam memenuhi syarat administrasi berdampak pada waktu penyelesaian secara tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Ketepatan waktu dalam melengkapi syarat administrasi akan meningkatkan efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Sehingga Alokasi Dana Desa dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2015), namun tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Annivelorita (2015). Peraturan yang membahas mengenai struktur birokrasi bagi aparat desa dirasa cukup jelas dan cukup mudah untuk dilaksanakan. Dilihat dari jawaban responden, mayoritas mengatakan bahwa alur dalam penyelesaian syarat administrasi untuk penyaluran Alokasi Dana Desa dapat diselesaikan secara tepat waktu. Hal ini menjelaskan mengapa desa yang menjadi sampel di Kabupaten Sumedang bisa efektif dalam penyaluran Alokasi Dana Desa,

salah satunya adalah karena struktur birokrasi yang baik dan mudah dijalankan oleh aparat desa.

3. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pengujian regresi pada variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah menghasilkan nilai t-hitung sebesar $2,256 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,984, sehingga didapatkan hasil bahwa hipotesis ketiga diterima. Atau dapat dikatakan, variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Selain itu, nilai signifikansi dari variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,026 atau kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Arah koefisien dari variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan angka positif, artinya semakin baik pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan semakin efektif juga penyaluran Alokasi Dana Desa nya.

Syarat administrasi penyaluran Alokasi Dana Desa beberapa diantaranya meliputi penyerahan surat pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran. Seorang KAUR Keuangan selaku aparat desa harus memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem akuntansi keuangan daerah untuk mempermudah menyelesaikan seluruh syarat administratif penyaluran Alokasi Dana Desa. Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dalam

penelitian ini diartikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan serangkaian prosedur akuntansi pelaporan keuangan.

Desa merupakan pemerintahan terkecil dari sebuah daerah. Penerapan kebijakan dan peraturan suatu desa diatur dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang diterapkan di lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Desa merupakan bagian dari daerah, yang berarti desa juga menerapkan sistem akuntansi yang sama dengan pemerintahan daerah lainnya.

Kemampuan seorang KAUR Keuangan desa dalam melaksanakan serangkaian prosedur akuntansi keuangan daerah yang baik akan mempermudah orang tersebut dalam membuat segala kebutuhan pelaporan keuangan di desa tempatnya bekerja. KAUR Keuangan yang memahami sistem akuntansi keuangan daerah akan membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam penyelesaian pekerjaannya dibandingkan dengan yang kurang paham. Selain itu, laporan yang dihasilkan pun akan lebih baik dan mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam pelaporan. Apabila KAUR Keuangan tersebut dapat menyelesaikan pelaporan keuangannya lebih cepat dan lebih baik, maka beberapa syarat administrasi untuk penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dilakukan dengan lebih cepat. Karena apabila ada kesalahan dalam pembuatan laporan, berkas akan dikembalikan ke desa untuk diperbaiki. Hal tersebut akan memakan waktu dan membuat penyaluran Alokasi Dana Desa menjadi terlambat.

Sehingga pemahaman seorang aparat desa yang dalam hal ini KAUR Keuangan akan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik sangatlah penting. Semakin cepatnya syarat administrasi dipenuhi pada pemerintah daerah, semakin cepat pula penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dilakukan. Efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa akan meningkat seiring dengan pemahaman sistem akuntansi daerah yang baik yang dimiliki KAUR Keuangannya.

Dilihat dari jawaban responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman KAUR Keuangan yang menjadi objek penelitian akan sistem akuntansi keuangan Daerah cukup baik dikarenakan rata-rata menjawab setuju yang berarti paham. Namun, beberapa dari mereka masih belum paham mengenai akuntansi berbasis akrual. Hal tersebut disebabkan karena di desa tempat mereka bekerja ternyata belum menerapkan akuntansi berbasis akrual. Padahal seharusnya pemerintahan sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam sistem keuangannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ponamon (2014), namun tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sugeng (2014). Perbedaan hasil penelitian ini dikarenakan adanya perbedaan responden dan daerah objek penelitian. Responden dalam penelitian yang dilakukan Sugeng adalah Sekretaris Desa dan Kepala Desa, dan daerah yang dilakukan penelitian adalah Kabupaten Kediri. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah hal yang perlu dipahami oleh seorang bendahara dalam suatu organisasi pemerintahan. Sehingga hasil penelitian ini akan berbeda saat yang

menjadi repondennya adalah seseorang dengan jabatan yang berbeda. Selain itu, perbedaan tempat penelitian juga akan berpengaruh cukup signifikan, karena setiap daerah memiliki potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang berbeda. Selain itu, kebijakan pada masing-masing daerah tidaklah sama. Kabupaten Sumedang memiliki aparat desa yaitu KAUR Keuangan yang memiliki pemahaman sistem keuangan daerah yang baik salah satu diantaranya karena selalu mendapatkan bimbingan dan pelatihan dari pemerintah kecamatan dan atau pemerintah kabupaten. Bimbingan dan pelatihan ini dilaksanakan setiap akan dilakukannya penyaluran anggaran yang dalam hal ini adalah Alokasi Dana Desa. Sehingga setiap KAUR Keuangan di Kabupaten Sumedang memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem akuntansi keuangan daerahnya.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi, dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan data primer dimana data yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari jawaban responden atas pernyataan yang diajukan peneliti dalam bentuk kuesioner. Objek penelitian ini adalah KAUR Keuangan yang bekerja pada kantor desa di Kabupaten Sumedang. Terdapat 113 orang responden yang berasal dari 113 desa yang berbeda.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sehingga kualitas sumber daya manusia memiliki nilai rendah dan tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa.

2. Variabel struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin baik struktur birokrasi dalam pemerintahan desa, semakin efektif pula penyaluran Alokasi Dana Desa nya.
3. Variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman aparat desa mengenai sistem akuntansi keuangan daerah maka akan semakin efektif penyaluran Alokasi Dana Desa nya.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu struktur birokrasi dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Maka peneliti dapat memberikan beberapa implikasi kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Struktur birokrasi dan efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa memiliki hubungan yang positif. Sehingga semakin baik struktur organisasi suatu desa maka akan semakin efektif penyaluran Alokasi Dana Desa nya. Alur tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dalam penyaluran Alokasi Dana Desa yang akan dijalankan oleh aparat desa haruslah memiliki kemudahan dalam dipahami dan dijalankan. Karena Alokasi Dana Desa

harus secepat mungkin disalurkan agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat desa. Adanya petunjuk yang jelas dan rinci dalam peraturan yang dibuat pemerintah akan alur kerja pemerintahan desa dalam penyaluran Alokasi Dana Desa akan berpengaruh pada waktu penyelesaian kerjanya.

2. Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa memiliki hubungan yang positif. Sehingga semakin baik pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah aparat desanya, maka akan semakin efektif penyaluran Alokasi Dana Desanya. Kemampuan seorang aparat desa akan prosedur akuntansi keuangan daerah dapat mempersingkat waktu dalam penyelesaian syarat administrasi penyaluran Alokasi Dana Desa. Saat waktu penyelesaian dapat dilakukan tepat waktu atau bahkan lebih cepat, penyaluran Alokasi Dana Desa akan bisa sampai ke masyarakat lebih cepat pula. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan tepat waktu akan meningkatkan nilai efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa suatu desa. Sehingga pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah adalah salah satu hal penting yang harus dimiliki aparat desa terutama KAUR Keuangan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran guna menyempurnakan penelitian selanjutnya. Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya:
 - a. Penelitian ini hanya terbatas pada variabel kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi, dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan faktor lain yang dianggap dapat memberikan pengaruh pada efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa seperti penerapan sistem informasi akuntansi, dikarenakan saat ini seharusnya setiap desa telah menerapkan sistem informasi akuntansi bernama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
 - b. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian yang lainnya. Memilih Kabupaten lain yang lebih maju dibandingkan Kabupaten Sumedang bisa mendapatkan hasil penelitian yang berbeda dari penelitian ini.
2. Untuk Pemerintah Desa Kabupaten Sumedang:
 - a. Mempekerjakan aparat desa dan memberikan jabatan berdasarkan latar belakang pendidikannya. Sehingga latar belakang pendidikannya sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilakukan.
 - b. Memberi pemahaman dan pendidikan kepada aparat desa yang berwenang melakukan pelaporan keuangan mengenai akuntansi berbasis akrual. Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintahan harus sudah berbasis akrual.

Sedangkan dilihat dari jawaban responden dalam penelitian ini mayoritas belum mengerti mengenai akuntansi berbasis akrual. Sehingga akan lebih baik apabila aparat desa terutama KAUR Keuangan mendapatkan pelatihan dan pendidikan mengenai akuntansi berbasis akrual, karena laporan keuangan berbasis akrual menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, Dini, et al. “Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi Terhadap Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Probolinggo”, **J-PAL**. 2014, 5.
- Berita Kemendagri. **Penerapan Sistem Akuntansi Akrua di Daerah Belum Optimal**. 2015. <http://www.kemendagri.go.id/news/2015/11/24/penerapan-sistem-akuntansi-akrua-di-daerah-belum-optimal> (Dob/iakses 26 Maret 2017)
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. **Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa**. 2015. <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesad.pdf> (Diakses 25 Juli 2017)
- Gani, Irwan, & Siti Amalia. **Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi & Sosial**. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2015.
- Ghozali, Imam. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**. Semarang: Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
- Halen, dan Diana Dwi Astuti. “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan *Accrual Basis* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Jember”, **Jurnal Ekonomi**. 2013.
- Hernawan, Denny. “Kajian Kompetensi SDM Aparatur dalam Menunjang Kinerja Pemerintah”. 2014.
- Jukardi, Adang. **Anggaran Dana Desa dan ADD di Kab Sumedang Tahun Depan Naik**. 2015. <http://www.pikiran-rakyat.com/jawabarat/2015/12/07/352797/anggaran-dana-desa-dan-add-di-kab-sumedang-tahun-depan-naik> (Diakses tanggal 2 Maret 2017)

- Jurniadi, et al. "Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur", **eJournal Administrative Reform**. 2015, 1, hal. 112-124.
- Kadir. **Statistika Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian**. Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Kurnia, Indra. "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan", **Artikel**. 2013.
- Lind, Douglas A., et al. **Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi. Edisi 15**. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014.
- Manalu, Simon Bolivar. **Konsep Otonomi Daerah, Good Governance, dan Reinventing Government dalam Pembangunan Daerah**. 2014. http://www.kompasiana.com/simonmanalu/konsep-otonomi-daerah-good-governance-dan-reinventing-government-dalam-pembangunan-daerah_54f97771a333111a648b46a8 (Diakses tanggal 2 Maret 2017)
- Moningka, Shinta Bonita. "Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon". 2014, 1.
- MR. **ICW Lansir Data Korupsi di Desa**. 2016. [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584a829de499b/Melihat%20surve%20yang%20dipaparkan%20Tama,%20Direktur%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20Desa%20\(PMD\),%20Taufik%20Majid%20mempunyai%20solusi%20lain%20dengan%20menekan%20atau%20memerintak%20Pemerintah%20Daerah%20\(Pemda\)%20untuk%20lebih%20mengawas%20kepala%20desa.%20%E2%80%9CFrasi%20pemda,%20fungsi%20Camat%20dan%20Kabupaten%20kita%20pe](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584a829de499b/Melihat%20surve%20yang%20dipaparkan%20Tama,%20Direktur%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20Desa%20(PMD),%20Taufik%20Majid%20mempunyai%20solusi%20lain%20dengan%20menekan%20atau%20memerintak%20Pemerintah%20Daerah%20(Pemda)%20untuk%20lebih%20mengawas%20kepala%20desa.%20%E2%80%9CFrasi%20pemda,%20fungsi%20Camat%20dan%20Kabupaten%20kita%20pe) (Diakses tanggal 3 Maret 2017)
- Musianto, Lukas S. "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian", **Jurnal Manajemen & Kewirausahaan**. September 2002, 4, hal. 123-136.
- NN. **Pengertian Efektivitas Kerja adalah Menurut Definisi Para Ahli**. 2015. <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-efektivitas-kerja-adalah.html> (Diakses 14 Maret 2017)
- Nordiawan, Deddi, et al. **Akuntansi Pemerintahan**. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009.

- Nurfatriani, Fitri, et al. "Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau", **Jurnal Analisis Kebijakan Hutan**. Agustus 2015, 12, hal. 105-124.
- Pamungkas, Pradono Tri. "Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi Terhadap Pemberdayaan UMKM". 2015.
- Panggulu, Yosua T. "Efektivitas Kebijakan Retribusi pada Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Kepulauan Palau". 2013, 2.
- Pemerintah Kabupaten Sumedang. "**Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa**". Dalam *Petunjuk Teknis Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa*. Sumedang, 2016.
- Prasetyo, Yudhi dan Gregorius Nasiansenus Masdjojo. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di 10 Desa Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang", **Prosiding Seminar Multi Nasional Disiplin Ilmu & Call For Papers**. 2015.
- Priatna, Asep Ginanjar. "Peranan Anggaran Pendapatan Daerah Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Pendapatan Asli Daerah". 2008.
- Putra, I Putu Indra Mandhala. **Hukum Pajak**. 2014. https://www.academia.edu/10947091/TUGAS_HUKUM_PAJAK_Otonomi_Daerah (Diakses 25 Juli 2017)
- Radar Tarakan. **SDM Pegang Peranan Penting**. 2016. <http://humas.malinau.go.id/read/news/2016/158/sdm-pegang-peranan-penting> (Diakses tanggal 26 Maret 2017)
- Raharjo, Sahid. **Tutorial Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson SPSS**. 2014. <http://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-autokorelasi-dengan-durbin-watson.html>(Diakses tanggal 14 Maret 2017)
- Rahayu, Ni Luh Sri, et al. "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah". **e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1**. 2014, 2.
- Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi**

dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 2015.
<http://www.keuangandes.com/wp-content/uploads/2015/02/Permendagri-Nomor-84-Tahun-2015-Susunan-Organisasi-dan-Tata-Kerja-Pemerintah-Desa.pdf>. (Diakses 2 Maret 2017)

Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.** 2014. <http://www.keuangandes.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-Kuangan-Desa.pdf>. (Diakses 2 Maret 2017)

Republik Indonesia, Pemerintah. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.** 2005. http://www.lakip.do.am/peraturan/PP_24_2005_SAP.pdf. (Diakses 2 Maret 2017)

Republik Indonesia, Pemerintah. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.** 2010. <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>. (Diakses 2 Maret 2017)

RepublikIndonesia,Presiden.**Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor1Tahun2004 tentangPerbendaharaanNegara.**2004.
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161111.pdf(Diakses 2 Maret 2017)

RepublikIndonesia,Presiden.**Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.** 1999.
<http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=339>(Diakses 2 Maret 2017)

RepublikIndonesia,Presiden.**Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.**1999.
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_25.pdf(Diakses 2Maret 2017)

RepublikIndonesia,Presiden.**Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor32Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dandaerah.**2004.
<http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-32-tahun-2004-tentang->

[pemerintahan-daerah/UU-227-262-UU_No._32_Tahun_2004_Pemerintahan_Daerah.pdf](#)(Diakses 2 Maret 2017)

RepublikIndonesia,Presiden.**Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor6Tahun 2014tentangDesa**.2014.https://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UU_NO_6_2014-Desa.pdf(Diakses 2 Maret 2017)

Riawan. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Yang Dimoderasi Dengan SIMDA Pada SKPD Kabupaten Buton Utara”, **JESP**. Maret 2016, 8.

Rochmi, Muhammad Nur. **Benarkah Birokrasi Indonesia Mengerikan**. 2016. <https://beritagar.id/artikel/berita/benarkah-birokrasi-indonesia-mengerikan>(Diakses tanggal 26 Maret 2017)

Saputra, I Wayan. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014”, **Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi**. 2016, 6.

Sipayung, Juliarni. ”Efektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Dali Serdang”. 2014.

Sugeng. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kediri”, **Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis**. Juli 2014, 1.

Sugiyono. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)**. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.

Sujarweni, V. Wiratna. **Akuntansi Desa: Paduan Tata Kelola Keuangan Desa**. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press, 2015.

[Sunyoto, Danang. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Yogyakarta: Penerbit CAPS, 2011.](#)

Tandiontong, Mathius. **Kualitas Audit dan Pengukurannya**. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.

Tewu, Mikael Eukarista. “Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Aktifitas Kelompok Tani di Desa Tember”, **e-Journal Acta Diurna**. 2015, 4.


Tuasikal, Abdullah. **Diklat PNS Sebagai Upaya Pengembangan SDM Aparatur**. 2014. <http://www.tribun-maluku.com/2014/01/diklat-pns-sebagai-upaya-pengembangan.html> (Diakses tanggal 26 Maret 2017)

Tuasikal, Askam. "Pengaruh Pengawasan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah", **Jurnal Keuangan dan Perbankan**. Juni 2008, 10, hal. 66-88.

Usman, dan Lukman Pakaya. "Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango". 2014.

Yusrialis. "Budaya Birokrasi Pemerintahan (Keprihatinan dan Harapan)", **Jurnal Sosial Budaya**. Januari-Juli 2012, 9.

Lampiran 2 Surat Pemberian Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Jl. Prabu Gajah Agung No.9 Kel. Situ Sumedang Utara 45352 Telp. (0261) 206081,
 Fax. (0261) 201022 SUMEDANG

Nomor	: 070/274-PPEP/Bapppp./2017	Sumedang, 3 April 2017
Sifat	: Biasa	Kepada Yth.
Lampiran	: -	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
Perihal	: <u>Pemberian Ijin Penelitian</u>	2. Camat se-Kabupaten Sumedang

di
SUMEDANG


Memperhatikan Surat dari Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta Nomor : 1084/UN19.12/KM/2017 Tanggal 24 Maret 2017 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, diberitahukan bahwa di lingkungan/wilayah kerja Bapak/Ibu akan dilakukan Penelitian oleh:

Nama : **Rahma Yunis**
 Judul : Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Struktur Birokrasi dan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumedang
 Waktu : Tanggal 7 April s.d. 7 Juli 2017

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan memberikan Ijin Penelitian diatas dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya serta maksud kegiatan dengan menunjukan surat keterangan ini kepada Unit Kerja yang dituju, segera setelah tiba di tempat yang dituju
2. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghormati adat kebiasaan masyarakat serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepribadian Bangsa Indonesia dan situasi setempat
3. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul metode dan kegiatan dimaksud
4. Segala apa yang dilakukan dalam hubungan kegiatan tersebut harus selalu sejalin pejabat setempat
5. Pada akhir kegiatan agar memberikan salinan laporan berupa **Hard Copy dan Soft Copy (CD/ Flash Disk)** kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah c.q. Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan**
6. Hasil kegiatan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain, melainkan hanya untuk tujuan tersebut diatas
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan apabila surat keterangan ini berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kembali.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
 Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Kabupaten Sumedang,

Drs. H. SANUSI MAWI, M.Si
NIP. 19581229 198503 1 006

Tembusan :

1. Bupati Sumedang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta;
4. Kepala Desa se- Kabupaten Sumedang;

Lampiran 3 Kuesioner Penelitian Sebelum Uji Kualitas Data

KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, STRUKTUR
BIROKRASI, DAN PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN SUMEDANG

Dengan Hormat,

Kuesioner ini hanya digunakan dalam rangka pengambilan data untuk penyusunan bahan penelitian skripsi oleh Rahma Yunis, Mahasiswi Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Jawaban yang diberikan tidak berpengaruh terhadap penilaian kinerja Bapak/Ibu/Sdr/i. Dimohon untuk berkenan mengisi kuesioner ini seluruhnya dengan jujur dan sebenarnya. Pengisian yang jujur dan objektif dapat sangat membantu keberhasilan penelitian ini.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Sdr/i, saya ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN (Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai)

1. Nama :(boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : a. Laki-Laki
b. Perempuan
3. Usia : a. 21-30 tahun c. 41-50 tahun
b. 31-40 tahun d. >50 tahun
4. Pendidikan Terakhir : a. SD c. SMA e. S1
b. SMP d. D3 f. S2
5. Desa Tempat Bekerja :

Bapak/Ibu/Sdr/i dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih kolom yang tersedia dengan cara disilang (X). Jika menurut Bapak/Ibu/Sdr/i tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Kolom jawaban adalah sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

A. Kualitas Sumber Daya Manusia

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Latar belakang pendidikan yang saya miliki sesuai dengan bidang pekerjaan yang dibebankan.					
2	Pendidikan yang saya miliki menunjang bidang pekerjaan yang dibebankan.					
3	Dalam memahami program kerja sering mengalami kesulitan karena kurang mengerti apa yang akan dikerjakan.					
4	Selalu memahami setiap pekerjaan yang ditugaskan oleh atasan, sehingga mudah dalam pelaksanaannya.					
5	Mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi diluar organisasi, sehingga tidak terlalu kaku dalam menerapkan aturan-aturan.					
6	Instansi tempat saya bekerja mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan.					
7	Pendidikan dan pelatihan membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan.					
8	Membuat syarat administratif penyaluran Alokasi Dana Desa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri.					
9	Pendidikan dan pelatihan Alokasi Dana Desa yang didapat jauh berbeda dengan pelaksanaan tugas di					

	lapangan.					
--	-----------	--	--	--	--	--

B. Struktur Birokrasi

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui petunjuk teknis penyaluran Alokasi Dana Desa.					
2	Saya mengetahui petunjuk pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa.					
3	Adanya pembagian tugas yang jelas dalam penyaluran Alokasi Dana Desa.					
4	Ada <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap staf dalam mengurus penyaluran Alokasi Dana Desa.					
5	Ada keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan diantara instansi pelaksana penyaluran Alokasi Dana Desa.					
6	Harus ada aturan yang mengatur pembagian tugas dan wewenang dalam penyaluran Alokasi Dana Desa.					
7	Adanya rasa tanggung jawab atas penyaluran Alokasi Dana Desa.					
8	Setiap pegawai harus mempunyai <i>job description</i> atau uraian pekerjaan yang jelas.					
9	Alur penyaluran Alokasi Dana Desa mudah dilaksanakan tepat waktu.					

C. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Setiap transaksi keuangan pada Desa ini didukung oleh bukti transaksi.					
2	Saya memahami sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas.					
3	Saya memahami sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas.					
4	Saya memahami sistem dan prosedur akuntansi aset tetap.					
5	Saya memahami sistem dan prosedur akuntansi					

	selain kas.					
6	Saya memahami sistem dan prosedur penyajian laporan keuangan.					
7	Saya memahami sistem pencatatan <i>double entry</i> .					
8	Saya memahami prosedur akrual basis.					
9	Pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap semester.					
10	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.					

D. Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Dalam pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa selalu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya.					
2	Penyaluran Alokasi Dana Desa selalu tepat waktu.					
3	Penyaluran Alokasi Dana Desa telah mencapai sasaran.					
4	Penyaluran Alokasi Dana Desa meningkatkan pembangunan prasarana fisik desa.					
5	Penyaluran Alokasi Dana Desa mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.					
6	Penyaluran Alokasi Dana Desa bermanfaat terhadap kebutuhan masyarakat.					

Lampiran 4 Kuesioner Penelitian Setelah Uji Kualitas Data

KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, STRUKTUR
BIROKRASI, DAN PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN SUMEDANG

Dengan Hormat,

Kuesioner ini hanya digunakan dalam rangka pengambilan data untuk penyusunan bahan penelitian skripsi oleh Rahma Yunis, Mahasiswi Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Jawaban yang diberikan tidak berpengaruh terhadap penilaian kinerja Bapak/Ibu/Sdr/i. Dimohon untuk berkenan mengisi kuesioner ini seluruhnya dengan jujur dan sebenarnya. Pengisian yang jujur dan objektif dapat sangat membantu keberhasilan penelitian ini.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Sdr/i, saya ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN (Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai)

1. Nama :(boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin* : a. Laki-Laki
b. Perempuan
3. Usia* : a. 21-30 tahun c. 41-50 tahun
b. 31-40 tahun d. >50 tahun
4. Pendidikan Terakhir* : a. SD c. SMA e. S1
b. SMP d. D3 f. S2
5. Desa Tempat Bekerja* :

***Wajib diisi**

Bapak/Ibu/Sdr/i dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih kolom yang tersedia dengan cara disilang (X). Jika menurut Bapak/Ibu/Sdr/i tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Kolom jawaban adalah sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

A. Kualitas Sumber Daya Manusia

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Latar belakang pendidikan yang saya miliki sesuai dengan bidang pekerjaan yang dibebankan.					
2	Pendidikan yang saya miliki menunjang bidang pekerjaan yang dibebankan.					
3	Selalu memahami setiap pekerjaan yang ditugaskan oleh atasan, sehingga mudah dalam pelaksanaannya.					
4	Instansi tempat saya bekerja mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan.					
5	Pendidikan dan pelatihan membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan.					
6	Membuat syarat administratif penyaluran Alokasi Dana Desa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri.					

B. Struktur Birokrasi

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
7	Saya mengetahui petunjuk teknis penyaluran Alokasi Dana Desa.					
8	Saya mengetahui petunjuk pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa.					

9	Adanya pembagian tugas yang jelas dalam penyaluran Alokasi Dana Desa.					
10	Adanya rasa tanggung jawab atas penyaluran Alokasi Dana Desa.					
11	Ada keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan diantara instansi pelaksana penyaluran Alokasi Dana Desa.					
12	Harus ada aturan yang mengatur pembagian tugas dan wewenang dalam penyaluran Alokasi Dana Desa.					
13	Setiap pegawai harus mempunyai <i>job description</i> atau uraian pekerjaan yang jelas.					
14	Alur penyaluran Alokasi Dana Desa mudah dilaksanakan tepat waktu.					

C. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
15	Setiap transaksi keuangan pada Desa ini didukung oleh bukti transaksi.					
16	Saya memahami sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas.					
17	Saya memahami sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas.					
18	Saya memahami sistem dan prosedur akuntansi aset tetap.					
19	Saya memahami sistem dan prosedur akuntansi selain kas.					
20	Saya memahami sistem dan prosedur penyajian laporan keuangan.					
21	Saya memahami prosedur akrual basis.					
22	Pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap semester.					
23	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.					

D. Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
24	Dalam pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana					

	Desa selalu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya.					
25	Penyaluran Alokasi Dana Desa selalu tepat waktu.					
26	Penyaluran Alokasi Dana Desa telah mencapai sasaran.					
27	Penyaluran Alokasi Dana Desa meningkatkan pembangunan prasarana fisik desa.					
28	Penyaluran Alokasi Dana Desa mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.					
29	Penyaluran Alokasi Dana Desa bermanfaat terhadap kebutuhan masyarakat.					

Lampiran 5 Hasil Uji Reliabilitas

a. Variabel Dependen: Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,795	6

b. Variabel Independen: Kualitas Sumber Daya Manusia

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,703	9

c. Variabel Independen: Struktur Birokrasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,718	9

d. Variabel Independen: Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,808	10

Lampiran 6 Hasil Uji Validitas

a. Variabel Dependen: Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa

Correlations

		ADD1	ADD2	ADD3	ADD4	ADD5	ADD6	TTLADD
ADD1	Pearson Correlation	1	,624**	,193	,786**	,534*	,483*	,906**
	Sig. (2-tailed)		,002	,401	,000	,013	,027	,000
	N	21	21	21	21	21	21	21
ADD2	Pearson Correlation	,624**	1	,307	,442*	,108	,081	,699**
	Sig. (2-tailed)	,002		,176	,045	,641	,726	,000
	N	21	21	21	21	21	21	21
ADD3	Pearson Correlation	,193	,307	1	,424	,240	,156	,442*
	Sig. (2-tailed)	,401	,176		,056	,294	,500	,045
	N	21	21	21	21	21	21	21
ADD4	Pearson Correlation	,786**	,442*	,424	1	,661**	,693**	,905**
	Sig. (2-tailed)	,000	,045	,056		,001	,001	,000

	N	21	21	21	21	21	21	21
ADD5	Pearson Correlation	,534*	,108	,240	,661**	1	,626**	,660**
	Sig. (2-tailed)	,013	,641	,294	,001		,002	,001
	N	21	21	21	21	21	21	21
ADD6	Pearson Correlation	,483*	,081	,156	,693**	,626**	1	,633**
	Sig. (2-tailed)	,027	,726	,500	,001	,002		,002
	N	21	21	21	21	21	21	21
TTLADD	Pearson Correlation	,906**	,699**	,442*	,905**	,660**	,633**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,045	,000	,001	,002	
	N	21	21	21	21	21	21	21

b. Variabel Independen: Kualitas Sumber Daya Manusia

Correlations

	SDM1	SDM2	SDM3	SDM4	SDM5	SDM6	SDM7	SDM8	SDM9	TTLSDM
SDM1	1	,692**	,102	,180	-,043	,173	,009	,421	,214	,617**
		,001	,659	,435	,853	,454	,968	,057	,351	,003

SDM7	Pearson Correlation	,009	-,055	-,211	,668**	,455*	,541*	1	,434*	-,145	,468*
	Sig. (2-tailed)	,968	,813	,359	,001	,038	,011		,049	,529	,032
	N	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
SDM8	Pearson Correlation	,421	,276	,202	,581**	,483*	,395	,434*	1	-,014	,806**
	Sig. (2-tailed)	,057	,226	,380	,006	,027	,077	,049		,953	,000
	N	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
SDM9	Pearson Correlation	,214	,426	,314	-,314	-,572**	-,006	-,145	-,014	1	,329
	Sig. (2-tailed)	,351	,054	,166	,166	,007	,981	,529	,953		,146
	N	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
TTLSDM	Pearson Correlation	,617**	,562**	,429	,522*	,253	,569**	,468*	,806**	,329	1
	Sig. (2-tailed)	,003	,008	,052	,015	,268	,007	,032	,000	,146	
	N	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

c. Variabel Independen: Struktur Birokrasi

Correlations

	BIRO1	BIRO2	BIRO3	BIRO4	BIRO5	BIRO6	BIRO7	BIRO8	BIRO9	TTLBIRO
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

	Sig. (2-tailed)	,107	,035	,423	,644	,241		,203	,808	,872	,025
	N	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
BIRO7	Pearson Correlation	-,225	-,219	-,115	-,177	,288	,290	1	,701**	,560**	,470*
	Sig. (2-tailed)	,327	,340	,620	,442	,205	,203		,000	,008	,031
	N	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
BIRO8	Pearson Correlation	-,117	-,139	,149	,069	,371	,056	,701**	1	,630**	,584**
	Sig. (2-tailed)	,614	,549	,519	,766	,098	,808	,000		,002	,005
	N	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
BIRO9	Pearson Correlation	,097	,227	,397	,063	,264	,038	,560**	,630**	1	,709**
	Sig. (2-tailed)	,675	,322	,075	,785	,247	,872	,008	,002		,000
	N	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
TTLBIRO	Pearson Correlation	,588**	,564**	,647**	,261	,685**	,487*	,470*	,584**	,709**	1
	Sig. (2-tailed)	,005	,008	,002	,254	,001	,025	,031	,005	,000	
	N	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

d. Variabel Independen: Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Correlations

		AKT1	AKT2	AKT3	AKT4	AKT5	AKT6	AKT7	AKT8	AKT9	AKT10	TTLAKT
AKT1	Pearson Correlation	1	,567**	,690**	,598**	,184	,327	-,058	,361	,686**	,577**	,652**
	Sig. (2-tailed)		,007	,001	,004	,424	,148	,804	,108	,001	,006	,001
	N	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
AKT2	Pearson Correlation	,567**	1	,782**	,731**	,487*	,289	,076	,478*	,454*	,509*	,782**
	Sig. (2-tailed)	,007		,000	,000	,025	,204	,743	,028	,039	,018	,000
	N	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
AKT3	Pearson Correlation	,690**	,782**	1	,957**	,630**	,226	-,099	,463*	,524*	,540*	,825**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,000	,002	,325	,668	,035	,015	,011	,000
	N	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
AKT4	Pearson Correlation	,598**	,731**	,957**	1	,720**	,211	-,074	,299	,458*	,478*	,795**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,000		,000	,359	,749	,188	,037	,028	,000
	N	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
AKT5	Pearson Correlation	,184	,487*	,630**	,720**	1	,422	,149	,050	,150	,080	,634**
	Sig. (2-tailed)	,424	,025	,002	,000		,057	,520	,830	,516	,731	,002

Lampiran 7

Data Jawaban Kuesioner Responden

No. Responden	Skor untuk item no:																																
	SDM							BIRO							AKT							ADD											
	1	2	3	4	5	6	TT L	7	8	9	10	11	12	13	14	TT L	15	16	17	18	19	20	21	22	23	TT L	24	25	26	27	28	29	TT L
1	4	4	4	4	4	3	23	4	4	5	5	5	4	5	3	35	5	4	4	4	4	4	3	4	4	36	5	4	4	5	5	5	28
2	4	4	3	4	4	3	22	3	4	4	4	4	4	4	3	30	4	4	4	4	3	4	3	3	4	33	4	3	3	5	4	4	23
3	5	4	4	4	4	2	23	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24
4	2	4	4	4	4	1	19	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24
5	3	4	5	4	5	1	22	5	5	5	5	4	4	4	4	36	5	4	4	4	4	4	3	5	5	38	4	5	4	4	4	5	26
6	3	4	5	4	5	1	22	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44	4	4	4	4	4	4	24
7	4	4	4	4	4	4	24	4	4	5	5	5	4	5	4	36	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38	4	4	4	5	5	5	27
8	4	4	4	4	4	4	24	4	4	5	5	4	5	5	4	36	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38	4	4	4	5	5	5	27
9	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	4	4	4	4	5	4	25
10	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	4	4	4	4	5	4	25
11	4	4	4	4	4	2	22	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	24
12	4	4	3	4	4	2	21	4	4	4	4	4	4	4	3	31	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	4	4	4	4	4	4	24
13	4	4	5	4	5	1	23	4	4	4	5	4	5	5	3	34	5	4	4	3	3	4	3	4	4	34	4	4	4	5	4	5	26
14	4	4	4	4	5	1	22	4	4	5	5	5	5	5	4	37	5	4	4	3	3	3	3	4	4	33	5	4	4	4	4	5	26
15	3	3	4	5	5	4	24	4	4	4	4	4	4	4	2	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	2	4	4	3	4	21
16	3	3	4	4	5	3	22	4	4	4	4	4	4	4	3	31	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	4	3	3	3	3	3	19
17	4	4	5	5	5	5	28	5	5	5	5	5	5	5	4	39	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38	5	4	5	5	5	5	29
18	4	4	5	5	5	5	28	5	5	5	5	5	5	5	4	39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	4	5	5	5	5	29
19	2	4	4	4	5	5	24	4	4	4	5	5	5	5	2	34	5	2	2	2	2	4	3	1	5	26	5	2	5	5	4	5	26
20	2	4	4	4	4	2	20	4	4	4	4	3	4	4	2	29	5	4	2	2	2	2	1	3	2	23	2	2	4	3	4	4	19
21	3	4	4	5	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35	4	3	4	4	4	4	23

51	4	4	4	5	4	5	26	4	4	4	4	4	5	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	26	
52	4	4	4	4	4	2	22	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34	4	4	4	4	24
53	4	4	4	4	5	2	23	4	4	5	5	5	5	5	5	38	5	4	4	4	3	4	3	4	4	35	4	4	4	5	26
54	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	4	4	4	37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	5	25
55	4	4	4	5	5	2	24	4	4	5	5	4	4	5	4	35	5	5	5	5	5	5	4	2	5	41	4	3	4	5	25
56	4	4	4	5	5	2	24	4	4	5	5	4	4	5	4	35	5	5	5	5	5	5	4	2	5	41	4	3	4	5	25
57	4	4	3	4	4	2	21	4	4	4	4	3	4	4	2	29	4	4	4	4	3	4	2	4	2	31	3	3	2	4	20
58	3	3	4	4	5	2	21	4	4	4	5	4	4	4	5	34	4	4	4	3	3	4	3	4	4	33	4	3	5	4	24
59	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	3	5	5	4	33	4	3	3	4	3	3	3	4	4	31	4	4	4	5	26
60	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4	3	5	5	4	32	4	3	3	4	3	3	3	4	4	31	4	4	4	5	26
61	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	5	5	4	28
62	4	4	4	3	3	4	22	4	4	5	5	4	5	5	5	37	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39	5	5	5	5	30
63	4	4	4	3	3	4	22	4	4	5	5	4	5	5	5	37	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39	5	5	5	5	30
64	3	3	4	5	5	1	21	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	4	4	5	4	4	4	40	1	1	3	5	18
65	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	3	3	4	4	22
66	4	5	5	4	4	4	26	5	5	4	5	5	4	4	4	36	5	5	5	4	3	3	3	5	4	37	3	5	4	5	25
67	4	5	5	4	4	4	26	5	5	4	5	5	4	4	4	36	5	5	5	4	3	3	3	5	4	37	3	5	4	5	25
68	3	4	4	5	5	3	24	3	3	3	3	3	3	3	3	24	4	3	3	3	3	4	3	4	4	31	4	3	4	4	22
69	3	4	4	5	5	3	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	3	3	3	3	4	3	4	4	31	4	3	4	4	22
70	1	5	5	5	5	2	23	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	4	5	5	29
71	1	5	5	5	5	2	23	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	4	5	5	29
72	3	5	5	5	5	3	26	4	4	5	5	3	3	4	5	33	5	2	2	3	3	2	3	2	5	27	5	5	3	4	26
73	3	5	5	5	5	3	26	4	4	5	5	3	3	4	5	33	5	2	2	3	3	2	2	5	5	29	5	5	3	4	26
74	4	4	4	5	4	4	25	4	4	4	4	4	4	5	5	34	5	4	4	4	4	4	4	2	4	35	4	4	4	4	24
75	4	4	4	5	4	4	25	4	4	4	4	4	4	5	5	34	5	4	4	4	4	4	4	2	4	35	4	4	4	4	24
76	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	4	4	4	4	3	4	4	36	4	4	4	4	24
77	3	4	4	4	5	4	24	4	4	4	4	4	4	4	3	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	5	26
78	5	4	3	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	5	4	33	4	4	4	4	5	4	5	4	4	38	4	4	4	4	24
79	4	4	4	4	5	1	22	3	4	4	5	4	5	4	5	34	5	4	3	4	4	4	4	4	4	36	4	5	3	2	23

80	5	4	4	4	4	2	23	4	4	4	4	4	4	4	3	31	4	4	4	3	3	4	3	4	4	33	3	3	4	4	4	4	22
81	3	3	4	4	4	2	20	3	4	4	4	4	4	3	3	29	4	3	3	3	3	3	3	4	4	30	4	3	4	4	4	4	23
82	5	4	4	5	5	4	27	5	5	4	4	4	4	5	5	35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	3	4	3	4	4	22
83	3	3	4	4	4	2	20	4	4	4	4	4	4	5	5	34	4	4	4	4	3	4	4	4	5	36	4	3	4	2	4	4	21
84	2	4	4	2	5	4	21	4	4	4	4	4	5	5	2	32	4	4	4	4	4	4	2	4	4	34	2	2	2	4	4	4	18
85	2	4	3	2	4	4	19	4	4	4	4	4	5	5	2	32	4	4	4	4	4	4	2	4	4	34	2	2	2	4	4	4	18
86	3	4	4	4	4	2	21	4	4	4	4	3	5	5	5	34	5	4	4	3	3	4	3	4	4	34	4	4	4	5	5	5	27
87	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	5	5	40	4	5	4	5	4	5	4	5	4	40	4	5	4	4	4	5	26
88	2	2	4	4	4	2	18	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	2	2	4	2	4	2	28	4	2	4	4	4	4	22
89	3	4	3	5	3	2	20	3	3	4	4	3	5	4	2	28	5	3	3	3	3	3	3	4	4	31	3	3	4	5	3	5	23
90	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	5	5	5	5	5	40	4	4	4	4	3	5	3	4	5	36	4	5	4	5	5	5	28
91	3	4	3	4	4	2	20	4	4	4	5	4	5	5	4	35	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	5	4	5	5	5	5	29
92	3	4	3	4	4	2	20	4	4	4	5	4	5	5	4	35	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	5	4	5	5	5	5	29
93	3	4	5	5	5	1	23	4	5	5	5	5	4	5	4	37	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	5	5	5	5	5	5	30
94	3	4	4	4	5	1	21	4	4	4	5	4	4	4	4	33	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	5	5	5	5	5	5	30
95	4	4	4	4	5	4	25	4	4	5	5	5	5	5	3	36	5	3	3	3	3	3	3	5	5	33	4	2	3	4	4	4	21
96	2	2	5	5	5	4	23	4	4	5	5	5	5	5	3	36	5	3	3	3	3	3	3	4	5	32	4	2	3	4	4	4	21
97	3	2	4	3	5	3	20	4	2	4	5	2	5	4	2	28	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35	4	4	4	4	4	5	25
98	3	2	5	5	5	3	23	2	2	4	5	4	4	4	2	27	5	4	4	4	4	3	3	4	4	35	5	4	4	5	5	4	27
99	4	4	4	5	5	2	24	4	4	5	5	5	5	5	5	38	5	4	4	4	4	5	4	4	4	38	4	5	4	3	4	4	24
100	4	3	2	4	5	2	20	4	4	4	4	4	4	4	2	30	4	3	2	2	2	4	3	4	4	28	4	2	5	5	5	5	26
101	4	2	4	4	4	4	22	3	4	4	4	4	4	4	4	31	4	4	4	3	3	4	3	3	4	32	4	4	4	4	4	4	24
102	4	2	4	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	3	3	4	3	4	4	33	4	4	4	4	4	4	24
103	5	5	5	5	5	4	29	4	4	4	4	4	4	5	2	31	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	2	2	4	5	4	4	21
104	4	4	3	4	5	2	22	4	4	4	4	4	5	4	2	31	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35	4	2	4	5	5	4	24
105	2	2	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	3	3	3	4	3	4	4	4	32	4	5	4	5	5	5	28
106	4	4	4	4	5	4	25	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	5	5	5	4	4	4	5	5	42	4	5	4	4	5	5	27
107	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	3	5	5	4	33	4	3	3	4	3	3	3	4	4	31	4	4	4	4	5	5	26
108	4	4	2	4	4	3	21	4	4	4	4	3	4	4	2	29	4	3	3	3	3	4	3	4	4	31	4	3	4	4	4	4	23

109	3	4	2	4	4	3	20	4	4	4	4	3	4	4	2	29	4	3	3	3	3	4	3	4	4	31	4	3	4	4	4	4	23
110	3	3	4	4	4	4	22	4	4	4	4	3	3	4	3	29	4	4	4	3	3	3	3	3	3	30	4	3	3	4	4	4	22
111	3	4	4	5	5	1	22	5	5	5	5	5	5	5	3	38	5	4	4	4	4	4	3	4	4	36	2	2	4	4	4	5	21
112	4	4	4	4	4	2	22	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	3	3	3	4	4	33	4	4	4	4	4	4	24
113	4	4	4	4	4	2	22	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	3	3	3	4	4	33	4	4	4	4	4	4	24

RIWAYAT HIDUP



Rahma Yunis, lahir di Sumedang, 2 Februari 1994, merupakan anak keenam dari enam bersaudara. Bertempat tinggal di Jalan Kosera II No 16, Babakan Hurip, Sumedang 45322. Pendidikan Formal pada SDN Sindangraja lulus tahun 2006, dilanjutkan ke SMPN 2 Sumedang lulus pada tahun 2009, serta melanjutkan ke SMAN 2

Bandung mengambil Program Ilmu pengetahuan Alam dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya peneliti mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan lolos menjadi mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta di Tahun 2013.

Selama kuliah, peneliti aktif mengikuti kepanitian yang diselenggarakan di kampus Universitas Negeri Jakarta. Diantaranya adalah menjadi Bendahara pada kegiatan *The International Seminar and Conference (ISC) on Islamic Economics and Beyond* tahun 2014, menjadi Staff Divisi Publikasi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2015, lalu menjadi Bendahara pada kegiatan *Government Visit* tahun 2015, dan menjadi Wakil Ketua pada kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) tahun 2015. Peneliti juga pernah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Pertamina Hulu Energi-*Offshore North West Java* pada Juni sampai dengan Agustus 2016 di Divisi *Finance Control and Accounting (FC&A)*.